

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Partai Amanat Nasional

Tumbangnya rezim Soeharto dari tampuk kepemimpinannya pada tahun 1998, melahirkan gejala baru tumbuh tak terbendung mewarnai gairah politik Indonesia. Bahkan setiap sektor kehidupan masyarakat, tak luput dari pergeseran seperti: ekonomi, politik, hingga pada sektor kehidupan sosial. Kebebasan menjadi dasar para elit politik dan aktivis reformasi berbersukacita merayakan dengan membentuk gerakan politik yang bertujuan untuk menghargai demokrasi. Dari sekian banyak aktualisasi yang dilakukan oleh beberapa aktivis reformasi muncul beberapa gerakan-gerakan politik yang akan mewarnai arus demokrasi di Indonesia salah satunya adalah majelis Amanat Rakyat atau sering disebut sebut (MARA). Terbentuknya MARA ini merupakan gerakan awal yang diinisiasi beberapa aktivis reformasi yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita dan memperjuangkan demokrasi agar lebih baik lagi.¹

MARA akhirnya berkomitmen dengan membentuk partai politik sebagai jalan perjuangan yang kemudian melahirkan partai amanat nasional. Gejala tidak dapat dihindarkan di dalam internal marah itu sendiri tetapi dalam perjalanannya MARA memiliki konklusi di mana orang-orang yang memiliki kesamaan pemahaman untuk melanjutkan perjuangan melalui politik mendirikan partai yang bernama Partai Amanat Nasional. Amien Rais, Daniel Sparingga, Gunawan Muhammad, Toety Heraty, Arifin Panigoro, dan Faisal Basri, Rizal Ramli, Albert Hasibuan. Tokoh-tokoh di atas merupakan yang menyepakati untuk mendirikan Partai Amanat Nasional.² Sementara untuk anggota yang tidak berminat di dalam partai tetap dipersilahkan berada di dalam MARA, selain itu pembentukan PAN juga memiliki problem akibat dipengaruhi isu yang berkaitan dengan salah satu tokohnya yaitu Amien Rais yang diberitakan akan bergabung dengan Partai Persatuan

¹ Saputra, *Pergolakan Partai Islam di Tahun Politik*, ed. by padma bunga, 1st edn (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), 24.

² Ali Thaufan Dwi Saputra, *Pergolakan Partai Islam di Tahun Politik* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), 30.

Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Akan tetapi rencana tersebut batal.

Sebelum lahir Partai Amanat Nasional para tokoh MARA mengadakan pertemuan pada agustus 1998 tepatnya tanggal 5 sampai 6 di Mega Mendung Bogor, Terdapat kesepakatan nama Partai Amanat Bangsa (PAB) dari beberapa anggota MARA yang menghendaki adanya partai politik. Setelah melakukan perundingan lebih jauh nama tersebut akhirnya diganti menjadi Partai Amanat Nasional (PAN) yang di mana partai ini memiliki tugas untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat, kemajuan, demokrasi dan keadilan sosial. Cita-cita partai ini memiliki landasan fundamental pada moralitas agama kemanusiaan dan kemajemukan untuk prinsip selanjutnya partai ini menganut konsep *nonsekretarian* dan *nondiskriminatif*³

Isu politik yang telah dilontarkan adalah membuka wacana dialog tentang Indonesia sebagai negara republik federasi. Hal ini mewarnai pertemuan para tokoh marah yang diselenggarakan di Megamendung Bogor pada tanggal 5 sampai 6 Agustus 1998. Dinilai sebagai alternatif dari negara kesatuan yang dewasa ini justru terancam disintegrasi. Titik sentral dialog ini adalah keadilan dalam mengelola sumber daya, sehingga rakyat dari Sabang sampai Merauke dapat benar-benar merasakan sebagai warga bangsa Indonesia.⁴ Gagasan wacana Indonesia baru yang dimunculkan pada akhir Agustus 1998 itu sempat menimbulkan pro dan kontra berrbagai kalangan.

Tanggal 23 Agustus 1998 di Istora Senayan Jakarta menjadi saksi sejarah Dideklarasikanya Partai Amanat Nasional, dihadiri oleh ribuan massa yang antusias membawa semangat reformasi. Puluhan tokoh-tokoh besar berkumpul untuk tampil dipanggung, melambai-lambaikan tangan menyambut riuhnya tepuk tangan hadirin menandakan antusiasme masyarakat akan didirikannya Partai Amanat Nasional (PAN). Pengesahan pendirian Partai Amanat Nasional sendiri berdasarkan Depkeh HAM No. M-20.UM.06.08 tanggal 27 Agustus 2003. Sebagai partai yang lahir di penghujung era Orde Baru, PAN didirikan dengan gairah politik baru untuk

³ Saputra, *Pergolakan Partai Islam di Tahun Politik*, ed. by padma bungga, 1st edn (jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), 34.

⁴ Ali Thaufan Dwi Saputra, *Pergolakan Partai Islam di Tahun Politik* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), 28.

menggantikan nuansa pemerintahan *otokratik* yang kental pada zaman orde baru.⁵

Sejarah mencatat kongres pertama Partai Amanat Nasional di Yogyakarta pada tanggal 10 sampai 13 Februari tahun 2000 sempat mengalami jalan buntu. Waktu itu ketua umum DPP PAN A.M Fatwa menginisiasikan asas iman dan taqwa. Hal tersebut bukan tanpa alasan mengingat latar belakang A.M Fatwa lahir dari rahim agama Islam yang kuat tetapi keadaan sosiologis agama yang berada di Indonesia memiliki agama yang beragam sehingga terjadi dua pandangan terhadap gagasan tersebut. Dalam kongres tersebut terdapat dua irisan yang melihat gagasan ketua umum DPP pan pada waktu itu A.M Fatwa yang menginisiasi tentang iman dan taqwa, pertama irisan yang Pro terhadap gagasan tersebut diantaranya DPW Sumatera Barat, Jawa Barat, Sumatera Utara, Bali, Bengkulu dan Kaltim untuk yang kontra yang memiliki irisan berbeda dengan yang pertama diinisiasi oleh DPW Papua Barat, NTT dan Sulawesi Utara. pro kontra tersebut bukan sebatas di ranah DPW melainkan juga merambah sampai ke jajaran pengurus DPP PAN yang di mana SEKJEN PAN pada waktu itu Faisal Basri dan WASEKJEN PAN Santoso beserta ketua departemen hubungan luar negeri yang dijabat oleh Bara Hasibuan menolak secara tegas atas ide tersebut karena mereka memiliki pandangan dasar partai ini didirikan sebagai partai yang plural dan terbuka.⁶

A.M Fatwa juga memiliki statement pedas terhadap kejelasan identitas partai bahkan dianalogikan bahwasanya pan seperti makhluk hidup yang memiliki kelamin ganda ataupun hermaphortide. Maka dari itu A.M Fatwa mengklarifikasi atas ide dan gagasannya tersebut beliau menegaskan telah menimbang selama setahun atas kegelisahan partai amanat nasional ini karena pada waktu itu partai-partai memiliki satu pemahaman yang terklasifikasi antara Partai Islam ataupun Partai Nasionalis. salah satu ketua DPD PAN Biak yaitu Dance Yasir sempat mengancam akan keluar dari partai amanat nasional serta membubarkan PAN di Biak dan membuat partai baru, selain ganja ancaman keluar diutarakan oleh Amir

⁵ Robot, *Bila Ujung Pena Menusuk Jantung Rezim* (Sleman: Deepublish, 2016),179.

⁶ Tempo, *Partai Islam : Partai Amanat Nasional, Partai Lahir di Era Reformasi yang Mencoba Bertahan* (Jakarta: Tempo Publishing, 2019), 49-51.

Sidharta, selaku ketua departemen seni dan budaya PAN, hal tersebut juga diikuti oleh Santoso salah satu ketua DPP PAN⁷ Kebuntuan tersebut menghasilkan berita yang beredar tentang partai amanat nasional terpecah semakin kencang akibat gagasan am fatwa sampai salah satu tokoh reformasi yang juga ikut mendirikan pan serta mantan ketua DPP Muhammadiyah Amien Rais ikut turun gunung memberikan klarifikasinya Amien Rais mengatakan tidak ada perubahan yang signifikan terhadap asas dia juga berjanji akan berupaya semaksimal mungkin.

Kongres pertama Partai Amanat Nasional akhirnya telah menemukan jalan yang ditempuh yang dirasa dapat menjadi penengah di antara kedua irisan ide dan gagasan yang mewarnai dinamika kongres partai amanat nasional pertama yaitu partai amanat nasional menerapkan asas iman dan taqwa yang memiliki pemahaman netral sekalipun jika dilihat iman dan taqwa lebih cenderung condong terhadap Islam.⁸ Akhirnya kubu *pluralis* bisa menerima keputusan tersebut. gejala partai amanat Nasional tidak berhenti pada keputusan kongres tersebut tetapi meninggalkan catatan kelam bagi sebagian kader PAN yang memiliki pemahaman tentang pluralisme yang begitu tinggi salah satunya adalah Amir Sidharta yang mengikuti langkah Faisal Basri yang hengkang dari partai amanat nasional akibat Amien Rais dinilai memihak kepada satu golongan yaitu umat Islam pada apel Akbar sejuta umat.⁹

Gejolak dinamika Partai Amanat Nasional tidak berhenti sampai di sini, mengingat sejarah menyatakan bahwasanya salah satu lokomotif reformasi yaitu Amien Rais di awal pendirian Partai Amanat Nasional memprakarsai partai ini dengan asas Pancasila. Alasan beliau menggunakan asas Pancasila karena Amien Rais beranggapan bahwasanya partai islam itu terlalu sempit apabila digunakan artinya pasar pemilihnya itu sudah jelas, maka dengan ijhtihad partai yang memiliki asas Pancasila dinilai akan lebih peluang karena akan merepresentasikan dari sifat karakteristik partai tersebut yaitu

⁷ Fitria, *Kamus Sejarah dan Budaya Indonesia* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2023), 140.

⁸ Tempo, *Partai Islam : Partai Amanat Nasional, Partai Lahir di Era Reformasi Yang Mencoba Bertahan* (Jakarta: Tempo Publishing, 2019), 59.

⁹ Zazuli, *Sejarah Agama Manusia* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018), 87.

keterbukaan yang dapat dia memasuki oleh semua golongan untuk menghargai kemajemukan. Tahun 2019 terjadi gejolak di dalam diri Partai Amanat Nasional hal ini diprakarsai juga oleh salah satu pendirinya yaitu Amien Rais yang memiliki pandangan bertolak belakang dari pendirian Partai Amanat Nasional itu sendiri jika dulu Amien Rais memiliki gagasan tentang partai yang terbuka yang menggunakan asas Pancasila maka kali ini Amien Rais memiliki pandangan tentang *Neo-Modernisme* Islam yang di mana hal itu melatarbelakangi pecahnya antara Partai Amanat Nasional dan Partai umat yang di mana hal itu didasari karena perbedaan sudut pandang ideologi.¹⁰

Idiologi yang dianut oleh partai-partai yang ada di Indonesia dapat kita petakan melalui kebijakan perilaku maupun dokumen partai berupa AD-ART yang terkolifikan menjadi dokumen normatif partai politik. Dhakidae dan Evans pernah melaksanakan penelitian yang mengulas tentang pemetaan gambaran ideologi partai politik yang berada di Indonesia dari keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dari teman yang mereka laksanakan dalam penelitian terdapat garis pertentangan antara basis ideologi nasional dan basis ideologi Islam untuk perbedaan dari keduanya menggunakan diklasifikasi antara developmentalisme dan sosialisme radikal sedangkan Evans menemukan yang memuat antara elitis dan propolis dari masyarakat Indonesia untuk melihat partai politik¹¹

Partai ini memiliki azas "Ahlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi sekalian Alam". Dengan azas itu PAN menjadikan agama sebagai landasan moral dan etika berbangsa dan bernegara yang menghargai harkat dan martabat manusia serta kemajemukan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan social, dan kehidupan bangsa yang lebih baik untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang makmur, maju, mandiri dan bermartabat dan partai ini adalah partai terbuka yang dimana siapapun dapat menjadi kader Partai Amanat Nasional tanpa mendikotomisasikan latar belakang

¹⁰ Prakoso Aji, *Analisi Dinamika Pemikiran Amien Rais Tentangf Konsepsi Islam dan Politik*, Syntax Idea, Vol. 5, No. 10, Oktober 2023.

¹¹ Yeby, 'Dinamika Partai Politik dan Positioning Ideologi Studi Tentang Pergeseran Positioning Ideologi Partai-Partai Politik Beserta Pemilu', 2.2 (2017), 163–85.

golongan dan individu.¹² Lahirnya pandangan Partai Amanat Nasional dalam menentukan asas politik ini memiliki sejarah yang panjang yang kemudian menemukan keyakinan bahwasanya nilai-nilai yang dijunjung oleh partai ini sudah sesuai dengan latar belakang didirikannya partai ini. pro kontra terhadap partai amanat nasional yang dinilai lebih condong ke umat Islam itu seluruhnya juga tidak dapat dibenarkan ketika kita melihat sejarah tokoh yang di luar Islam pun turut andil dalam pembentukan partai ini seperti Sumartana dan Alberd Hasibuan merupakan para pendiri yang memiliki agama Kristen sementara Sindunata dan Amir Sidharta keduanya memiliki keyakinan Tionghoa Katolik.¹³

Visi dari Partai Amanat Nasional adalah terwujudnya PAN sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur, pemerintahan yang baik dan bersih didalam Negara Indonesia yang demokratis dan berdaulat, serta di Ridhoi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Adapun misi dari PAN yaitu mewujudkan kader berkualitas, mewujudkan PAN sebagai partai yang modern berdasarkan sistem menejemen yang unggul serta budaya bangsa yang luhur, mewujudkan Indonesia baru yang demokratis, makmur, maju, mandiri, dan bermartabat, mewujudkan tata pemerintahan Indonesia yang baik dan bersih, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan Negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, bermartabat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial serta dihormati dalam pergaulan internasional. Garis perjuangan partai PAN adalah kemenangan pemilu, perkaderan yang handal, partai yang dicintai rakyat, dan membangun organisasi PAN yang modern.¹⁴

Good political party governance istilah tersebut banyak digunakan dan dikembangkan oleh negara-negara maju yang menganut sistem demokrasi *good party governance* memiliki

¹² Pan.or.id/sejarah-pan/ diakses pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2024 pukul 02.33 WIB.

¹³ Tempo, *Partai Islam : Partai Amanat Nasional, Partai Lahir di Era Reformasi Yang Mencoba Bertahan* (Jakarta: Tempo Publishing, 2019), 58.

¹⁴ Rizqo Dzulqornain and others, 'Pengajuan Pengujian AD / ART Partai Politik di Mahkamah Agung', (Jakarta: February, 2022), 10.

arti manajemen pengelolaan partai politik yang baik dan memadai. Menurut Warjio Othman, dan Ladiqi di jurnal ilmiah Pengungkapan Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik Sebagai Dasar Good Political Party Governance (Study Kasus Pada Partai Amanat Nasional Kabupaten Asahan). Tata kelola partai yang baik dan benar akan mengantarkan pengelolaan pemerintah yang baik atau istilahnya disebut good governance. Hal ini tidak terlepas dari teori negara yang digagas oleh Montesquie tentang trias politika yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif di lembaga-lembaga tersebut para pemimpin itu ditempati oleh para kader partai apabila kader dalam suatu partai tersebut sudah terbiasa mengelola dan manajemen partai dengan baik maka secara otomatis akan melahirkan tata kelola pemerintah yang baik.¹⁵

Fajrurrahman dalam karya Jurdi yang berjudul penghantar hukum partai politik menjabarkan tentang peran penting partai politik menurut Thomas Meyer, partai politik memiliki peranan yang strategis dan begitu penting mulai dari sarana politik pendidikan politik agregasi kepentingan komunikasi politik pengatur konflik serta rekrutmen politik.¹⁶ Peran Partai Amanat Nasional sebagai partai politik juga tercantum dalam anggaran dasar pasal 8 yang terbagi menjadi 12 ayat yang di mana di dalam pasal tersebut menguraikan secara rinci arah perjuangan partai amanat nasional dan kalau dilihat secara normatif dapat dimaknai sebagai peran Partai Amanat Nasional di ranah perjuangan sebagai partai politik.

Konsistensi Partai Amanat Nasional sampai sejauh ini perlu kita apresiasi karena latar belakang berdirinya partai ini memang gejolak yang muncul akibat pengkebirian kebebasan politik orde baru. Hal ini bukan tidak beralasan karena partai ini bukan semata-mata untuk meramalkan *euforia* kebebasan politik namun dapat kita lihat dan dapat kita rasakan konsisten di partai amanat nasional memilih nilai di atas rata-rata hal itu dibuktikan dengan AD-ART yang merupakan konstituan

¹⁵ Sapriani, Nurlaila dan Nurul Inayah, *Pengungkapan Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik Sebagai Dasar Good Political Party Governance (Study Kasus Pada Partai Amanat Nasional Kabupaten Asahan)*, Jurnal Inovasi Penelitian, No.1Juni2023, Vol.4

¹⁶ Jurdi, *Penghantar Hukum Partai Politik* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2020), 191.

tertinggi dari partai ini masih menjunjung nilai-nilai yang dibawa oleh para pendahulunya terlebih lagi secara perkembangan partai politik modern partai amanat nasional ini sudah mencantumkan *good political party governance* dalam AD-ART.¹⁷

2. Profil Al-Farabi

Beberapa sarjana Turki mendapatkan karyanya yang berbentuk manuskrip yang di mana karya Al-Farabi tersebut ingin dipecahkan. Hal tersebut dilaksanakan pada tahun 1370 Hijriyah atau 1950 Masehi. *Rekonsiliasi* tersebut merupakan upaya yang dilakukan untuk menggali pikiran-pikiran Al-Farabi melalui karyanya sekalipun dalam kegiatan tersebut memiliki kendala yaitu minimnya akses dan informasi.¹⁸ Abad pertengahan antara abad ke-4 sampai ke-10 hingga abad ke-7 sampai 13 merupakan tonggak awal pengulasan pikiran-pikiran Al Farabi dimulai dari kitab pengulasan pikiran-pikiran Al-Farabi dimulai dari Kitab *al-Fihrist*, karya Ibn al-Nadim, hanya memberikan informasi sedikit tentang kehidupan Al-Farabi Sementara biografi Al-Farabi yang agak panjang dalam kitab *Wafayat al- A'yan wa Anba Abna al-Zaman*, karya Ibn Khallikan, dan masih memiliki kontroversi mengenai keotentikannya.¹⁹

Konsep yang digagas oleh Al-Farabi melalui karya-karyanya mengajarkan kita perlu mengenal lebih jauh sosok pemikir Islam fenomenal yang dijuluki sebagai *Mu'allim Al-Tsani* (guru kedua). Bernama lengkap Abu Nasr Muhammad Ibn Muhammad Ibn Tarkhan Ibn Uzlaq al-Farabi, yang di mana beliau sering dikenal sebagai Al Farabi. Beliau lahir pada tahun 874 M/260 H di Farabi (Transoxia) yang terletak dalam wilayah kuno antara Sungai Amu Darya dan Sungai Syr Darya tepatnya di Asia Tengah yang mencakup wilayah Uzbekistan timur modern, Tajikistan barat, sebagian Kazakhstan selatan, sebagian Turkmenistan, dan Kyrgyzstan selatan. Ayahnya merupakan

¹⁷ Rizqo Dzulqornain and others, 'Pengajuan Pengujian AD / ART Partai Politik di Mahkamah Agung', (Jakarta: February, 2022), 10.

¹⁸ Izzudin, Disertasi, *Karya Al-farabi dan Relevansinya and Dengan Pancasila*, (Tangerang Selatan: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 109.

¹⁹ Ulum, *Al-Farabi: Sang Filsuf Muslim Pendiri Neoplatonisme* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2022), 22

seorang anggota tentara yang kurang mampu tetapi semua itu tidak menghalangi semangat untuk menuntut ilmu di Baghdad. Beliau mempelajari bahasa Arab di bawah pimpinan Ali Abu Bakr Muhammad Ibn al-Sariy, juga pada seorang *translator* Abu Bishr Matta ibn Yunus. Tidak berhenti di situ, ia melanjutkan perjalanannya menuntut ilmu ke Harran, pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil dan berguru kepada Yuhanna Ibn Jailan, tetapi ia tidak lama berada di sini. Ia kembali ke Baghdad dan menggunakan waktunya untuk berdiskusi, mengarang, dan mengulas buku-buku filsafat.²⁰

Sampainya di Baghdad semangat Al-Farabi terhadap keilmuan semakin menjadi-jadi khususnya di bidang ilmu logika. Al-Farabi juga berguru kepada Abū Bishr Mattā bin Yunus yang senantiasa menghadiri dalam majelisnya guna menambah wawasan. Dalam majelisnya sendiri Al-Farabi tidak kurang menciptakan karya sebanyak 70 kitab yang sebagian besar karyanya tersebut berisi tentang logika berdasarkan Aristoteles yang disarahinya kemudian diajarkan kepada murid-muridnya. saat berguru kepada Abū Bishr Mattā bin Yunus ada peristiwa unik yang di mana usia guru Al Farabi lebih mudah daripada usianya sendiri namun secara keilmuan dalam bidang logika Abū Bishr Mattā bin Yunus sangat menguasai dan lebih mendalami, pada saat itu juga Baghdad dipimpin oleh Al-Radi.²¹

Al-Farabi dididik dengan sifat *Qana'ah*, menjadikannya sederhana dan tidak tergila-gila pada harta serta keinginan duniawi. Ia lebih memprioritaskan pencarian ilmu daripada tujuan mencari kekayaan. Pada tahun 330 H/945 M, ia berpindah ke Damaskus dan bertemu dengan Saif Al-Daulah Al-Hamdani, Sultan dari Dinasti Hamdan di Aleppo. Karena mengakui kecerdasan alFarabi dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan, Sultan mengundangnya untuk tinggal di Istana Saif Al-Daulah di Aleppo. Di sana, ia mendalami ilmu pengetahuan dan filsafat. Disini Al-Farabi juga bertemu dengan

²⁰ Seyyed Hosein Nasr, *Three Muslim Sages: Avicenna-Suhrawardi-Ibn 'Arabi*, terj. Ach. Maimun Syamsuddin (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), 14

²¹ Izzudin, Disertasi, *Karya Al-farabi dan Relevansinya and Dengan Pancasila*, (Tangerang Selatan: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 111.

filosof Nasrani yaitu Yūhannā bin Haylan, Ia juga belajar tentang ilmu logika.²²

Al-Farabi menyusun kitab *Al-Siyasah Al-Madaniyyah*, dimulai dari Baghdad dan disempurnakan di Mesir kemudian pergi ke damaskus dan menetap di sana saat itu kekuasaan damaskus dipegang oleh Saif Al daulah bin Hamdan yang di mana Al-Farabi diberlakukan dengan baik. Sekalipun mendapatkan perlakuan bai dari raja ia memilih hidup dalam kesederhanaan seumur hidupnya dan meninggal pada tahun 950 M (339 H) di usia 80 tahun. Meski pribadinya sangat terhormat, ia dikenal sebagai ilmuwan terkemuka pada zamannya dan menguasai berbagai bahasa. Al-Farabi memiliki pengetahuan dalam bidang kedokteran, sains, matematika, sejarah, musik, logika, kimia, bahasa, dan filsafat. Filsafat menjadi kegemarannya, dan keahliannya dalam bidang ini melebihi al-Kindi dan Ibnu Rusyd.²³

Kehidupan Al-Farabi di Damaskus lebih cenderung menyendiri dan menepi dan tidak begitu bergaul dengan manusia yang lain, hal ini menunjukkan bahwasanya Al-Farabi mulai menjalankan diri sebagai seorang sufi. Kehidupannya juga dihabiskan di bawah pohon rindang sambil melanjutkan menulis karya-karya yang kebanyakan karya-karyanya dituliskan di lembaran-lembaran kertas. Sangat jarang sekali Al-Farabi menuliskan karyanya dalam buku sehingga banyak sekali karya-karya yang terpisah. diceritakan di kitab *Uyun al-Anba fi Tabagat al-Atibba* Al-Farabi adalah seorang memiliki kesibukan sebagai penjaga kebun di Damaskus tetapi kecintaannya dalam keilmuan tidak melupakannya, hal itu dibuktikan dengan tetapnya ia menekuni filsafat dan menjabarkan makna-maknanya. Sekalipun dalam keadaan terbatas hidup penuh kesederhanaan ia sangat sering bergadang di malam hari dengan cahaya pelita dan seorang penjaga kebun untuk menelaah serta menyusun kitab. Dari hasil perjuangannya tersebut membuahkan hasil dengan banyaknya murid-murid

²² Izzudin, Disertasi, *Karya Al-farabi dan Relevansinya and Dengan Pancasila*, (Tangerang Selatan: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 112.

²³ Muhammad Syafi'i, *Etika Dalam Pandangan Al-Farabi*, Ilmu Ushuluddin, Vol. 16, No. 2 Desember 2017, 139-160.

yang menjadi pemikir unggul dan menyebarnya karya-karya pemikiran beliau dan menjadi penanda zaman keemasan.²⁴

Sebagian besar Ilmuwan sepakat di dalam buku Al-Farabi: Sang Filsuf Muslim Pendiri Neoplatonisme bahwa Al-Farabi memahami filsafat Yunani, khususnya Plato dan Aristoteles. Pemikiran Al-Farabi tentang kedua tokoh tersebut terdokumentasi dalam karyanya, "*Kitab Al-Jam' Baina Ra'yai al-Hakimaini*". Dalam karyanya ini, Al-Farabi mengomentari pandangan Plato dan Aristoteles yang oleh banyak orang dianggap berbeda, tetapi bagi Al-Farabi, keduanya sejalan. Tidak ada ilmuwan yang menyangkal pemahaman Al-Farabi terhadap kedua tokoh tersebut.²⁵ Al-Farabi mempelajari filsafat dari Yuhanna bin Hailan (w.295 H/907 M) di Harran. Selain filsafat dengan berbagai alirannya, dia juga mempelajari fisika, matematika, astronomi, dan musik dari Yuhanna. Di bidang musik, Al-Farabi tidak hanya seorang ahli tetapi juga menulis buku tentang kaidah musik yang bernama *Kitab Al-Musiqa Al-Kabir*. Meski memiliki keahlian luas, dia lebih terkenal sebagai ilmuwan dan filsuf. Ibnu Khallikan bahkan menyebut Al-Farabi sebagai filsuf Muslim terbesar abad itu.²⁶

Ibnu Abi Ushaibi'ah berpendapat didalam karya Seyyed Hosein Nasr, dengan judul *Three Muslim Sages: Avicenna-Suhrawardi-Ibn 'Arabi*, Al-Farabi mempelajari ilmu logika dari Yuhanna bin Hailan dan telah mempelajari *Analytica Posteriora*, dalam karya Muthhar, *The Ideal State* Al-Farabi di nilai melampaui pembahasan logika pada zamannya yang hanya fokus pada *Analytica Priora*. Al-Farabi mengomentari karya-karya Aristoteles, yang membuatnya dijuluki Al-Mu'allim Al-Tsani (Guru Kedua), setelah Aristoteles, yang dikenal sebagai Al-Mu'allim Al-Awwal (Guru Pertama). Menurut Hasan Hanafi, gelar ini tidak hanya menunjukkan keahlian dalam logika, tetapi juga komentarnya yang mendalam terhadap karya-karya Al-Farabi yang sebanding dengan Aristoteles. Hanafi menambahkan bahwa dalam komentarnya terhadap logika

²⁴ Izzudin, Disertasi, *Karya Al-farabi dan Relevansinya and Dengan Pancasila*, (Tangerang Selatan: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 113.

²⁵ Ulum, *Al-Farabi: Sang Filsuf Muslim Pendiri Neoplatonisme* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2022), 22.

²⁶ Seyyed Hosein Nasr, *Three Muslim Sages: Avicenna-Suhrawardi-Ibn 'Arabi*, terj. Ach. Maimun Syamsuddin (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), 19.

Aristoteles, setidaknya separuh atau bahkan dua pertiga komentar tersebut dapat dianggap sebagai karya orisinal Al-Farabi. Hal ini disebabkan sulit bagi Al-Farabi untuk mengakses sejarah Yunani pada awal munculnya filsafat Sebelum Masehi.²⁷

Pandangan Al-Farabi diuraikan Muhammad Syafi'i, dalam jurnal yang berjudul *Etika Dalam Pandangan Al-Farabi*, tentang pemikiran paradigma pemikiran barat dan pemikiran islam sebagai representasi timur memiliki persamaan, ini juga yang menjadi jembatan penghubung antara dua dunia pemikiran. Berdasarkan karyanya dapat disimpulkan paradigma keilmuan Islam mempunyai dua landasan, pertama ditemukan dalam karya-karya yang mencakup sejarah Muslim, dan kedua digagas dalam ide Plato, yang dimana seseorang dapat memahami Nabi Muhammad SAW. sebagai rujukan hukum, kelompok umat islam sebagai masyarakat politiknya, dan para filosof mengemban tonggak estafet pewaris sejati pendirinya. Paradigma pemikiran Plato memiliki andil dalam melegitimasi filsafat sebagai salah satu ilmu Muslim, sembari pada saat bersamaan menjadikan penawaran yang berani untukkonsepsi kepemimpinan ideal di dunia Islam.²⁸

Al-Farabi dinilai Muthar dalam *Ideal* dapat menyatukan dua tradisi yang memiliki perbedaan antara Yunani dan Islam yang diyakini sebagian besar kalangan, serta menjawab tiga persoalan pandangan filosofis yang memiliki alur yang sama dengan Islam, Pertama, membahas teritorial wilayah negara sempurna. Plato juga meyakini bahwa untuk mewujudkan suatu tatanan ideal melalui wadah berupa negara kota. Al-Farabi setuju pandangan ini dalam konteks tertentu al-Farabi memberikan pandangan lain tentang bentuk ummat atau kelompok yang memiliki makna sebuah golongan seperti komunitas Islam yang mungkin saja menjadikan gambaran meliputi seluruh penduduk tanpa terkecuali.²⁹

Sebagai peletak dasar ilmu politik Al-Farabi dinilai Ardiansyah, *Terapi Bahagia: Cara Mencapai Kebahagiaan Lewat Eksistensi Keilmuan dan Sains Ala Al-Farabi* memiliki pondasi filsafat politik Islam dengan mengakulturasi serta

²⁷ Muthhar, *The Ideal State* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018),124-125.

²⁸ Muhammad Syafi'i, *Etika Dalam Pandangan Al-Farabi*, Ilmu Ushuluddin, Vol. 16, No. 2 Desember 2017, 139-160.

²⁹ Muthhar, *The Ideal State* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018),124-125.

mentransformasikan gagasan Plato yang dilanjutkan oleh penulisnya itu Aristoteles. Penjabaran Al-Farabi tentang ilmu politik sebagai seni praktis yang menuntun jiwa untuk mencapai kebahagiaan yang memposisikan raja sebagai orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendatangkan kebahagiaan. Hal ini dapat kita lihat dari salah satu karyanya yaitu kitab *Tahsil al-Sa'adah* yang berbunyi

علم الأشياء التي بها أهل المدن بالاجتماع المدني ينال السعادة كل واحد بمقدار ما له أعد بالفطرة ٣٠

Artinya: Ilmu sesuatu yang dengannya penduduk kota, melalui asosiasi politik, memperoleh kebahagiaan. Masing-masing penduduk kota tersebut mempunyai bakat tertentu.

Al-Farabi memiliki kontribusi besar dalam fisika metafisika, ilmu politik, dan logika, menjadikannya tokoh terdepan di antara filsuf Muslim. Dia mendapat pujian dari *historiografer* atas penjelasannya tentang filsafat Plato dan Aristoteles serta karyanya, *Ihsa' al-Ulum*. Buku tersebut dianggap sebagai karya berbahasa Arab yang paling komprehensif dan cocok sebagai pengantar studi filsafat Aristoteles dan Plato, melebihi karya lain pada zamannya. Al-Farabi memiliki banyak karya dalam bidang sosial dan politik, seperti Kitab Ara' Ahl al-Madinah al-Fadhilah, Kitab al-Siyasah al-Madaniyah, *Ihsa' al-Ulum*, Kitab *Tahsil Al-Sa'adah*, Kitab *al-Millah wa Nususun Ukhra*, *Fadilat al-Ulum wa Al-Sina'at*, *Maqalah fi Aghrad ma ba'da Al-Thabi'ah*, Kitab *Tanbih 'Ala Sabil Al-Sa'adah*, Kitab *al-Fusus*, dan *Fusul Muntaza'ah*. Selain itu, ia juga menulis tentang musik dalam Kitab *Al-Musiqah al-Kabir*. Hal penting yang perlu ditekankan dari karya-karya Al-Farabi adalah keberadaan pemikirannya dalam filsafat, yang selalu menjadi landasan dalam setiap kajiannya, termasuk dalam bidang lain seperti sosial, politik, dan musik.³¹

Pemikiran Al-Farabi dikupas Muhammad Syafi'i, di jurnal berjudul Etika Dalam Pandangan Al-Farabi tentang etika politik memiliki landasan yang menjabarkan bahwasanya manusia itu

³⁰ Ardiansyah, *Terapi Bahagia: Cara Mencapai Kebahagiaan Lewat Eksistensi Keilmuan dan Sains Ala Al-Farabi* (Anak Hebat Indonesia, 2023), 67.

³¹ Ulum, *Al-Farabi: Sang Filsuf Muslim Pendiri Neoplatonisme* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2022), 22.

tidak bisa hidup sendiri melainkan manusia membutuhkan manusia lainnya untuk saling bekerja sama dalam menjalankan kehidupannya beliau melihat secara hakikat bahwasanya manusia tidak bisa terlepas dari ikatan-ikatan tersebut. dalam konteks yang berbeda Al-Farabi memiliki pandangan bahwasannya dari hakikat dasar manusia sebagai makhluk sosial maka harus memiliki konteks tujuan yang jelas, manusia sendiripun secara hakikat keinginan mencapai suatu kebahagiaan maka dari landasan awal berpikir Al-Farabi ini, manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan untuk mencapai kebahagiaan. Dengan hal tersebut Al-Farabi menganggap bahwasanya masyarakat yang sudah dapat menjalankan hakikat sebagai manusia dan untuk mencapai keinginannya maka masyarakat tersebut dikatakan sebagai masyarakat utama atau sempurna.³²

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Etika Politik Partai Amanat Nasional

Landasan konstitusional Partai Amanat Nasional berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga merupakan salah satu data yang dapat kita gunakan dalam memotret bagaimana etika politik partai ini. Namaun tentunya AD-ART belum seutuhnya menjadi tolak ukur untuk menyajikan jawaban objektif terhadap penelitian yang saya lakukan kali ini terdapat parameter pembanding lainnya yang saya gunakan untuk mencari jawaban yang apa adanya, seperti berita, pernyataan sikap partai dalam menghadapi peristiwa beserta hasil observasi yang saya lakukan di DPD PAN Kudus.

Pasal 11 menjabarkan tentang etika politik yang dianut oleh Partai Amanat Nasional yang tertuang dalam anggaran dasar berbunyi:

- a. Etika politik adalah panduan nilai-nilai moral yang dilandasi oleh asas, sifat, identitas, dan fungsi partai yang menjadi acuan pola pikir, sikap, dan tingkah laku kader, anggota, dan simpatisan Partai Amanat Nasional.

³² Muhammad Syafi'i, *Etika Dalam Pandangan Al-Farabi*, Ilmu Ushuluddin, Vol. 16, No. 2 Desember 2017,139-160.

- b. Ketentuan tentang etika politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.³³

Pemaparan di atas mengacu dari asas, sifat dan identitas Partai Amanat Nasional maka secara umum partai ini menggunakan asas yang berlandaskan Pancasila dan itu tertuang di dalam anggaran dasar Partai Amanat Nasional bab 3 pasal 4.

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Prinsip etika politik berdasarkan sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa moralitas dan spiritualitas dijadikan landasan fundamental untuk melakukan segala tindak-tanduk dan menjalankan sistem tata kelola kenegaraan. Nilai-nilai ketuhanan yang dituntun oleh Pancasila merupakan suatu tatanan yang digali dari nilai-nilai protektif agama dan nilai-nilai positif secara *inklusif* membebaskan persaudaraan dan memuliakan keadilan.³⁴

Apabila etika yang dilandaskan pada nilai-nilai ketuhanan yang maha esa dijalankan sebagaimana mestinya maka akan menjadi pembimbing bagi penyelenggara negara politisi dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa Tuhan yang maha esa menjadi *spirit* dalam melaksanakan tindak-tanduknya. Negara pun memberikan jaminan terhadap pemeluk-pemeluk agama yang diyakini oleh masyarakat serta menjamin untuk melaksanakan peribadatan dan kegiatan keagamaan yang lainnya.³⁵

- b. Kemanusiaan Yang Adil dan beradab

Prinsip etika politik berdasarkan sila kedua yang berbunyi Kemanusiaan Yang Adil Beradab dilandasi bahwasanya manusia adalah makhluk yang sempurna yang di mana dapat menjalankan kebudayaan yang dilandasi oleh potensi akal dan pikiran, rasa, cipta dan karsa dengan

³³ Rizqo Dzulqornain and others, 'Pengajuan Pengujian AD / ART Partai Politik di Mahkamah Agung', (Jakarta: February, 2022), 13.

³⁴ Winarmo, *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila (Edisi Revisi)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2023), 118.

³⁵ Ismail Nurudin, Nasrudin, and Sri Hartati, *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan* (Lampung Timur: Lintang Rasi Aksara Books), 35.

naruninya.³⁶ Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua ini didasarkan pada norma adil yang di mana hal tersebut dipahami sebagai suatu perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajiban atau sepadan yang harus dijalankan dan didapatkan oleh setiap individu. Hasil yang telah dilaksanakan oleh manusia tersebut akan menjadi suatu tatanan kehidupan yang beradab yang di dalamnya mencakup adab sopan dan santun berbudi luhur serta memegang susila.³⁷

c. Persatuan Indonesia

Prinsip etika politik berdasarkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, sila ini menjabarkan bahwasanya masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman yang begitu luar biasa banyak atau yang sering kita sebut sebagai pluralisme. Dengan suku bangsa yang majemuk yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia maka sila ketiga ini memiliki cakupan persatuan dalam konteks ideologi politik ekonomi sosial budaya dan hukum hal ini dipilih oleh *the founding fathers* bangsa Indonesia agar dari perbedaan tersebut kita terhindar dari perpecahan dan mencapai kebaikan bersama.³⁸ Dalam konteks politik tersebut hal ini merupakan landasan yang sangat penting di mana dalam politik seringkali *agregasi* ini memiliki perbedaan di setiap golongan dan di setiap individu maka dengan landasan sila ketiga ini dapat memberikan bimbingan kepada jiwa dalam melaksanakan etika politik yang beraneka ragam serta memiliki kesamaan pandangan yang di mana kita harus menjadi satu kesatuan sekalipun kita memiliki perbedaan.³⁹

³⁶ Winarmo, *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila (Edisi Revisi)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2023), 118.

³⁷ Ismail Nurudin, Nasrudin, and Sri Hartati, *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan* (Lampung Timur: Lintang Rasi Aksara Books), 35.

³⁸ Winarmo, *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila (Edisi Revisi)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2023), 119.

³⁹ Ismail Nurudin, Nasrudin, and Sri Hartati, *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan* (Lampung Timur: Lintang Rasi Aksara Books), 36.

- d. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Atau Perwakilan

Prinsip etika politik berdasarkan sila ke-empat yang berbunyi Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Atau Perwakilan, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan yang di mana kita pahami bersama keputusan tertinggi berada ditangan rakyat, melalui sistem *parlementer* atau lembaga *Legeslatif* keterwakilan. Lembaga *Eksekutif* pun juga menganut suara rakyat yang menentukan siapa sosok yang pantas dan berhak menjadi seorang pemimpin negara atau presiden melalui mekanisme pemilu langsung yang memberikan suara dan hak yang sama di setiap orang tanpa terkecuali.⁴⁰ Bidang *Yudikatif* juga pemilihan pimpinan itu berdasarkan dari lembaga Eksekutif dan Legislatif yang merupakan representasi dari demokrasi keterwakilan. Kekuatan masyarakat merupakan segala kunci utama yang melahirkan segala bentuk kebijakan yang ada yang ditujukan untuk mencapai cita-cita negara kita yang telah diatur di undang-undang dasar 1945 alinea ke-4 tetapi dengan begitu banyaknya orang yang ada di Indonesia maka dirasa itu tidak mungkin maka dilakukanlah sistem keterwakilan. Dalam ke pemerintahan pun juga menggunakan musyawarah mufakat yang mana hal tersebut merupakan sebagai salah satu karakter bangsa Indonesia.⁴¹

- e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Prinsip etika politik berdasarkan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang di sini dapat kita lihat bahwasanya sila ini memberikan hak dan kewajiban yang sama terhadap seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sebagai negara hukum Indonesia memiliki keadilan hidup bersama dan hal tersebut menjadikan komitmen dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks sistem pemerintahan hukum

⁴⁰ Winarmo, *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila (Edisi Revisi)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2023), 120.

⁴¹ Ismail Nurudin, Nasrudin, and Sri Hartati, *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan* (Lampung Timur: Lintang Rasi Aksara Books), 37.

juga berlaku di mana penyelenggaraan yang dijalankan oleh pemerintah harus mematuhi segala kebijakan kekuasaan, kewenangan serta pembagian yang mengikuti hukum yang berlaku. Apabila ada terjadi ketidak selarasan dengan hukum dan bahkan melanggar yang memiliki efek ketidakseimbangan maka perlu adanya juga sanksi sebagaimana hukum yang ada untuk mengatur hal tersebut.⁴²

Partai Amanat Nasional berasaskan akhlak politik berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam. Mengulas pemikiran Nurcholish Madjid dalam *thesis* Eka Zuliana, kehidupan politik harus berlandaskan kepada agama karena nilai-nilai keagamaan tidak hanya mencakup ukhrawi. Tatanan politik yang pada agama diatur dalam tata cara peribadatan duniawi, tidak mungkin lepas dari tuntunan moral yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Berpolitik juga memiliki standar akhlak mulia, yang sekarang disebut etika politik. Selain itu, masyarakat Indonesia memiliki berbagai macam keyakinan berupa agama, etika politik dalam agama-agama yang diakui oleh negara memiliki tuntunan etika berpolitiknya masing-masing sesuai dengan nilai-nilainya. Dalam Signifikansi persepsi etika politik Nurcholish Madjid dapat ditafsirkan ulang di dalam eksistensi Pancasila sebagai ilandasan etika politik bangsa Indonesia.⁴³

Arkoun dalam *Decoding Colonial Mindsets in Dawson* karya Nadir El Morabit menekankan pentingnya pendekatan akademis dalam studi politik, memperhatikan etika politik lebih dari sekadar kronologi *historis*. Dia juga menyoroti perlunya pemerintahan yang berbasis logika akademis daripada semata logika politis, serta kritik terhadap agamawan yang hanya menjadi alat legitimasi bagi pemerintahan yang menyimpang dari kebenaran. Selain itu, dia mengkritisi kaum fundamentalis yang sering

⁴² Winarmo, *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila (Edisi Revisi)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2023), 121.

⁴³ Eka Zuliana, *Thesis, Konsep Etika Politik Menurut Pemikiran Nurcholish Madjid*, (Medan: Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2015), 12.

menggunakan slogan kebangkitan Islam sebagai payung ideologi mereka.⁴⁴

Pendekatan Arkoun dalam jurnal *Decoding Colonial Mindsets in Dawson* memandang studi politik menekankan pentingnya mempertimbangkan etika politik secara lebih mendalam daripada sekadar mengikuti kronologi historis. Dia juga menyoroti perlunya pemerintahan yang berlandaskan pada logika akademis demi kepentingan yang lebih baik, serta mengkritik penyalahgunaan agama sebagai alat legitimasi untuk pemerintahan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kritiknya juga ditujukan kepada kaum fundamentalis yang sering menggunakan slogan kebangkitan Islam sebagai *justifikasi* bagi ideologi mereka.⁴⁵

Permasalahan moralitas, kepemimpinan, dan kesantunan dalam politik memang menjadi tantangan yang kompleks dan sering kali sulit diatasi. Perilaku elit politik yang meninggalkan nilai-nilai moral dapat merusak kehidupan politik suatu bangsa. Berbagai solusi telah diajukan untuk mengatasi kemerosotan moral dalam politik, termasuk kembali kepada ajaran agama sebagai landasan moral, terutama bagi elit politik dan masyarakat secara keseluruhan.⁴⁶

Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional pasal 6 mengatakan identitas partai amanat nasional menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas agama, kemanusiaan dan kemajemukan. Tidak ada teks secara eksplisit yang menunjukkan bahwa landasan partai ini harus menggunakan agama tertentu mengingat negara kita memiliki keyakinan yang banyak dan tidak spesifik menjadi negara agama. Tapi nilai-nilai yang dijunjung harus berdasarkan moralitas yang terdapat pada fragmen-fragmen tertentu dan nilai-nilai *inklusivitas* yang terdapat dalam suatu agama. Pada titik ini kita dapat melihat

⁴⁴ Nadir El Morabit, "Decoding Colonial Mindsets in Dawson" s Short Narratives on Morocco : A Thematic Analysis of ' Ben Ramar and the Christians ' and ' A Moorish Hero and - Juanita ' " 8 (2023): 668–84.

⁴⁵ Nadir El Morabit, "Decoding Colonial Mindsets in Dawson" s Short Narratives on Morocco : A Thematic Analysis of ' Ben Ramar and the Christians ' and ' A Moorish Hero and - Juanita ' " 8 (2023): 668–84....

⁴⁶ Eka Zuliana, Thesis, *Konsep Etika Politik Menurut Pemikiran Nurcholish Madjid*, (Medan: Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2015), 13.

toleransi juga dibutuhkan karena tidak mungkin bisa kita menekankan keseluruhan nilai-nilai agama terhadap etika politik khususnya tentang aqidah suatu agama.⁴⁷

Pasal 5 tentang Sifat mengatakan Partai Amanat Nasional bersifat terbuka dan mandiri. Dapat kita lihat bahwasanya pasal ini mendukung pasal sebelumnya yang di mana memberikan akses yang luas untuk seluruh warga negara Indonesia yang telah mencukupi persyaratan teknis yang lain untuk menjadi anggota Partai amanat nasional. Untuk mandiri sendiri Partai Amanat Nasional tidak memiliki ikatan terhadap platform organisasi lain seperti organisasi masyarakat Lembaga Swadaya Masyarakat dan pemerintahan.⁴⁸ Banyak yang gagal paham dalam menilai partai amanat nasional yang merupakan kaki tangan dari salah satu organisasi keagamaan yang ada di Indonesia yaitu Muhammadiyah. hal tersebut juga tidak bisa disalahkan karena latar belakang berdirinya partai amanat nasional sendiri diprakarsai salah satu mantan ketua umum PP Muhammadiyah yaitu Amien Rais tapi hal tersebut bertolak belakang karena di dalam anggaran dasar ini sudah dijelaskan secara gamblang dan lugas bahwasanya partai amanat nasional ini adalah mandiri.

BAB IV dalam Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional menjabarkan Tujuan dan arah perjuangan. Pasal 7 Tujuan menjabarkan bahwasanya Partai Amanat Nasional bertujuan mewujudkan Indonesia Baru yang menjunjung tinggi dan menegakkan nilai-nilai iman dan takwa, kedaulatan rakyat, keadilan sosial, kemakmuran dan kesejahteraan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara pasal 8 mengupas tentang arah perjuangan Partai Amanat Nasional yang berbunyi:

- 1) Mempertahankan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdaulat penuh di darat, laut, dan udara.
- 2) Terwujudnya Masyarakat Madani yang mengamalkan ajaran agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa

⁴⁷ Rizqo Dzulqornain and others, 'Pengajuan Pengujian AD / ART Partai Politik di Mahkamah Agung', (Jakarta: February, 2022), 10.

⁴⁸ Rizqo Dzulqornain and others, 'Pengajuan Pengujian AD / ART Partai Politik di Mahkamah Agung', (Jakarta: February, 2022), 11.

- dengan mengembangkan semangat saling menghormati dan bekerja sama.
- 3) Terwujudnya amanah kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui pemilihan umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.
 - 4) Terwujudnya pemerintahan yang bersih, sehat, kuat, dan berwibawa, bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
 - 5) Terciptanya sistem perekonomian Pancasila sesuai pasal 33 UUD 1945.
 - 6) Terwujudnya kedaulatan pangan dan energi.
 - 7) Penegakkan hukum yang adil tanpa diskriminasi melalui aparat dan institusi hukum yang bersih, mandiri, dan profesional.
 - 8) Menciptakan kebebasan pers yang bertanggungjawab yang dilandasi oleh hukum dan etika moral sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar, obyektif, dan transparan.
 - 9) Peningkatan kualitas pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, berintegritas, berakhlak, dan memiliki jiwa nasionalisme Indonesia.
 - 10) Terciptanya tatanan kehidupan sosial yang mengembangkan daya cipta, rasa, dan karsa yang unggul serta mengedepankan kearifan lokal sebagai kekayaan budaya nasional.
 - 11) Terpenuhinya perlindungan dan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴⁹

2. Konsep Etika Al-Farabi

Negara utama didefinisikan Mustofa Hasan sebagai masyarakat yang lengkap dan sempurna (*Al-Mujtama' Al-Kamilah*), seperti organisme tubuh manusia yang memiliki anggota yang *komplit*. Setiap organ harus berfungsi sesuai dengan tugasnya. Jika salah satu organ sakit, organ lain akan merasakan dampaknya dan menjaganya. Begitu pula dengan anggota masyarakat negara utama yang terdiri dari individu dengan kemampuan dan peran yang berbeda, hidup dengan

⁴⁹ Rizqo Dzulqornain and others, 'Pengajuan Pengujian AD / ART Partai Politik di Mahkamah Agung', (Jakarta: February, 2022), 11-12.

saling mendukung dan berbagi nasib. Setiap individu harus diberikan tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya maka dari itu Al-Farabi memiliki pandangan untuk mencapai idealitas yang mencakup makrokosmos perlu dibekali dengan mikrokosmos yang mendukung karena menurut Al-Farabi di dalam *Al Madinah Al Fadilah mikrokosmos* ataupun manusia merupakan pondasi awal untuk mencapai tatanan yang ideal.⁵⁰ Al-Farabi membagi keutamaan (yang harus dibangun dan disadari oleh setiap manusia ke dalam empat macam:

a. Keutamaan Teoritis *Al-Fadhâil Al-Nazhraiyyah*.

Menurut Al-Farabi dalam karya Muhammad Taufiq yang berjudul *Etika dalam Perspektif Filsafat Islam*” dalam Zuhri, *Etika: Teori dan Praktek*, setiap manusia mempunyai watak bawaan tertentu yang siap menerima bentuk-bentuk pengetahuan universal. Watak tersebut disebut intelek potensial *Al-`aql bi Al-quwwah*. Intelek ini akan berisi dan mengabstraksikan bentuk-bentuk pengetahuan setelah meningkat menjadi intelek aktual *Al-`aql bi Al-fi`l*. Namun, proses pengabstraksian tersebut tidak akan terjadi kecuali adanya cahaya dari intelek aktif. Maksudnya, *intelek* manusia harus mendapat bimbingan *intelek* aktif untuk dapat menangkap dan memahami sebuah objek. Al-Farabi, sumber pengetahuan bukanlah objek-objek material seperti kaum *empirisme*, juga bukan rasio semata seperti paham kaum *rasionalisme*, melainkan *intelek* aktif.⁵¹

Lantas muncul pertanyaan apa yang di maksud *Intelek* aktif? Al-Farabi mengidentifikasi intelek aktif dengan ruh suci *rûh Al-Quds* atau Jibril, malaikat pembawa wahyu dalam kajian teologi Islam. Intelek aktif adalah gudang sempurna bentuk-bentuk pengetahuan. Dia berfungsi sebagai model kesempurnaan intelektual. Manusia dapat mencapai tingkat wujud tertinggi yang dimungkinkan baginya ketika dalam dirinya mewujudkan sosok manusia hakiki *Al-Insân `Alâ Al-Haqîqah*, yaitu, ketika *intelek*

⁵⁰ Mustofa Hasan, *Sejarah Filsafat Islam (Geneologis dan Transmisi Filsafat Timur ke Barat)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 194.

⁵¹ Muhammad Taufik, “Etika dalam Perspektif Filsafat Islam” dalam Zuhri, *Etika: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: FA Press, 2016), 36.

manusia dapat bersatu dan menyerupai intelek aktif *Al-'Aql Al-Fa'âl* itulah yang menjadi sumber pengetahuan.⁵²

Al-Farabi menganalogikan hubungan antara intelek aktif dengan intelek potensial tersebut seperti hubungan antara matahari dengan mata dalam kegelapan. Mata hanyalah penglihatan potensial selama dalam kegelapan. Mataharilah selama ia memberikan penyinaran pada mata yang menyebabkan mata menjadi sebuah penglihatan yang aktual, sehingga objek-objek yang berpotensi untuk dilihat mata menjadi benar-benar tampak.⁵³ Seterusnya, cahaya matahari memungkinkan mata melihat bukan hanya objek-objek penglihatan belaka tetapi juga cahaya itu sendiri dan juga matahari yang merupakan sumber cahaya tersebut. Dengan cara yang kurang lebih sama, cahaya intelek aktif menyebabkan intelek potensial menjadi intelek aktual.⁵⁴ Intelek potensial juga dapat menangkap cahaya sekaligus memahami intelek aktif.

Al-Farabi menempatkan keutamaan teoritis atau sebagai hakikat dasar manusia yang digunakan untuk mencapai kebahagiaan. Karena Al-Farabi berpendapat dengan ilmu pengetahuan segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia yang sering disebut kebudayaan akan memiliki nilai-nilai yang dilandasi oleh kebenaran. sebagai seorang pemikir dari timur maka Al-Farabi tidak bisa lepas bagaimana nilai-nilai kebenaran yang diyakini merupakan tuntunan yang diberikan oleh Allah. Baik melalui petunjuk berupa Alquran sebagai pedoman hidup umat Islam dan wahyu yang didapatkan secara langsung oleh orang-orang pilihan yang sering kita sebut sebagai nabi dan rasul.⁵⁵

b. Keutamaan *Epistemik Al-Fadhâil Al-Fikriyyah*

Menurut Al-Farabi, ilmu pengetahuan hanya dapat diperoleh lewat metode-metode tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan. Metode-metode yang dimaksud adalah konsepsi langsung *Al-Tashawur* dan pembuktian

⁵² Ulum, *Al-Farabi: Sang Filsuf Muslim Pendiri Neoplatonisme* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2022), 22.

⁵³ Abu Nasr Al-Farabi, *Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah*, (Arab: Muafa' Fham al-Kutub, 1906), 55

⁵⁴ Muhammad Taufik, "Etika dalam Perspektif Filsafat Islam" dalam Zuhri, Etika: Teori dan Praktek, (Yogyakarta: FA Press, 2016), 36.

⁵⁵ Muhammad Taufik, "Etika dalam Perspektif Filsafat Islam" dalam Zuhri, Etika: Teori dan Praktek, (Yogyakarta: FA Press, 2016), 38

atas konsep *Al-Tashdīq*. Konsepsi langsung adalah sebuah jenis pengetahuan yang didapat secara langsung tanpa diupayakan atau didahului keinginan untuk mengetahuinya.⁵⁶ Pada tingkat awal, ia merupakan pengetahuan sederhana seperti pemahaman kita tentang matahari, bulan, binatang dan seterusnya. Pengetahuan sederhana ini merupakan prasyarat bagi munculnya bentuk-bentuk konsepsi yang lebih tinggi. Sebab, di antara sekian bentuk konsepsi ada konsepsi yang tidak dapat diturunkan kecuali didahului konsepsi-konsepsi lainnya, seperti konsepsi tentang sepotong balok tidak dapat dipahami kecuali didahului konsepsi tentang panjang, lebar dan tinggi. Puncaknya, konsepsi yang tertinggi adalah definisi sempurna *Al-hadd Al-Tāmm* yang menunjukkan essensi dari suatu objek yang didefinisikan.⁵⁷

Sementara itu, *Al-Tashdīq* adalah pembuktian atas konsep-konsep yang ada. Al-Farabi menyebut beberapa cara pembuktian atas sebuah konsepsi yang disebut *silogisme*. Istilah silogisme sendiri, secara bahasa, berasal dari bahasa Yunani *sullogismos* yang berarti mengumpulkan. Dalam bahasa Arab, *silogisme* ini biasanya diterjemahkan dengan *Al-Qiyās* atau *Al-Qiyās Al-Jam'i* yang mengacu pada makna asal, yaitu mengumpulkan. Menurut Al-Farabi, *Silogisme* adalah suatu bentuk penalaran di mana dua proposisi yang disebut premis dirujuk bersama sedemikian rupa sehingga sebuah konklusi niscaya menyertainya.⁵⁸

Silogisme ini biasanya terbagi dalam dua bentuk *silogisme* kategoris dan *silogisme hipotetis*. *Silogisme kategoris* adalah bentuk *silogisme* di mana premis-premisnya didasarkan atas data-data tak terbantah, mutlak tidak tergantung dari suatu syarat; silogisme hipotesis adalah bentuk silogis yang premis-premisnya tidak merupakan pernyataan mutlak melainkan tergantung pada sesuatu syarat apa yang dimaksud sebagai *silogisme* dalam

⁵⁶ Abu Nasr Al-Farabi, *Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah*, (Arab: Muafa' Fham al-Kutub, 1906), 56

⁵⁷ W Udasmoro, *Gerak Kuasa* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2020), 6.

⁵⁸ Udasmoro, *Gerak Kuasa* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2020), 18.

pandangan Al-Farabi adalah yang pertama, yaitu *silogisme* kategoris dan Al-Farabi menyebutnya sebagai *silogisme demonstratif al-qiyâs alburhânî*, yaitu suatu bentuk *silogisme* yang tersusun atas premis yang benar, primer dan perlu. Yang dimaksud premis yang benar, primer dan perlu ini adalah premis yang memenuhi syarat tertentu.⁵⁹

c. Keutamaan *Kosmis al-fadhâil alkhalqiyah*

Berbicara tentang kosmis atau alam dalam pandangan Al-Farabi kita tidak akan pernah lepas dari teori yang digagas olehnya tentang emanasi *Al Farid*. Teori ini menggambarkan tentang bagaimana proses *sistematis* kejadian suatu wujud yang mungkin terbentuk dari zat utama yaitu Tuhan.⁶⁰ Tuhan adalah akal pikiran yang bukan berupa benda di mana segala sesuatu yang hari ini menjadi realitas tentang ada itu berawal dari zat Tuhan itu sendiri. Lebih jauh Al-Farabi berpendapat dari pancaran zat Tuhan yang murni atau esa memunculkan bentuk-bentuk lainnya begitupun dari bentuk-bentuk yang diciptakan oleh zat yang Esa tersebut memberikan emansi atau pancaran terhadap objek yang akan diadakan.⁶¹

Alam semesta yang hari ini ada secara *realitas* merupakan pancaran dari *akal fa'al* atau akal ke-10 yang di mana bumi beserta isinya dan termasuk kita sebagai *mikrokosmos* berwujud manusia yang menjadi bagian *makrokosmos* berupa alam semesta. maka kita juga sebagai makhluk yang bertanggung jawab terhadap jalannya *makrokosmos* memiliki kewajiban untuk menjalankan peran sebagaimana mestinya dan kita dibekali akal sebagai alat yang digunakan untuk menopang keseimbangan alam semesta. dari sini dapat kita nilai pandangan Al-Farabi melalui teori emansinya yang menjabarkan tentang keadaan alam semesta dan kedudukan manusia di dalamnya memiliki *korelasi* terhadap hubungan vertikal tersebut. Akal yang dianugerahkan sebagai bekal manusia

⁵⁹ Krinus Kum, *Filsafat Logika: Pemikiran, Konsep, Teori, dan Penyimpulan* (Jakarta: Prenada Media, 2023),119.

⁶⁰ Abu Nasr Al-Farabi, *Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah*, (Arab: Muafa' Fham al-Kutub, 1906), 34.

⁶¹ Hadi Suprpto et al., "AL-Farabi dan Ibn Sina (Kajian Filsafat Emanasi dan Jiwa Dengan Pendekatan Psikologi)" II, no. 02 (n.d.): 443–51.

sudah seharusnya menjadi penuntun untuk menopang segala sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah.⁶²

Etika terhadap alam semesta merupakan salah satu hal yang perlu kita perhatikan kita harus tahu bagaimana letak illegal standing kita terhadap runtutan kehidupan alam semesta. sampai sini dapat kita pahami bahwasanya Al Farabi memiliki pemikiran yang di mana manusia harus memiliki akhlak yang baik bukan hanya semata-mata kita berhubungan dengan manusia dan Tuhan tetapi alam semesta ini merupakan satu hal yang tak boleh dipisahkan di dalam kehidupan manusia karena alam semesta memiliki perannya masing-masing yang merupakan pancaran dari akal murni yaitu Allah subhanahu wa ta'ala atau yang sering kita sebut Esa.⁶³

d. Keutamaan Praksis *Al-Fadhâil Al-‘Amaliyyah*

Praksis dapat kita pahami sebagai aktualisasi ataupun praktik, dalam ilmu filsafat dapat kita pahami praksis ini sebagai aksiologi yang di mana kegunaan dan tujuan untuk mencapai suatu hakikat kebenaran dan mencapai kebijaksanaan melalui hal-hal yang dikerjakan.⁶⁴ maka dari itu ketika kita setelah memahami tentang landasan mulai dari ilmu pengetahuan kemudian hakikat dasar manusia yang disambung dengan alam semesta Al-Farabi menambahkan bahwasanya praksis ini merupakan salah satu unsur utama yang tidak bisa dilepaskan untuk mencapai kebahagiaan.

Berdasarkan apa yang telah diutarakan Al-Farabi tentang landasan fundamental menurut pemikirannya, mengerucut pada satu bidang yang di mana hal itu merupakan suatu moralitas yang perlu diterapkan di setiap individu manusia.⁶⁵ Dalam pemikiran Islam hal tersebut dikatakan sebagai akhlak yang dimana Al-Quran itu sendiri turun sebagai pembimbing yang dapat digunakan menjadi pedoman tentang etika moralitas dan akhlak. Begitupun

⁶² Ulum, *Al-Farabi: Sang Filsuf Muslim Pendiri Neoplatonisme* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2022), 43

⁶³ Muhammad Taufik, “Etika dalam Perspektif Filsafat Islam” dalam Zuhri, Etika: Teori dan Praktek, (Yogyakarta: FA Press, 2016), 43

⁶⁴ Imam Khanafie Al-Jauharie, *Tema-Tema Pokok Filsafat Islam*, (Pekalongan: NEM, 2020), 93.

⁶⁵ Abu Nasr Al-Farabi, *Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah*, (Arab: Muafa' Fham al-Kutub, 1906), 76.

Rasul ataupun nabi menurut Al-Farabi, Nabi Muhammad itu bukan semata-mata turun hanya untuk menyebarkan ajaran yang diterima olehnya melalui Jibril tetapi ada tatanan moralitas yang pada saat itu memiliki standarisasi yang sangat tidak masuk akal.⁶⁶

Secara esensial Farabi dalam karya Khanafie Al-Jauharie, *Teema-Tema Pokok Filsafat Islam*, menilai etika ini merupakan salah satu misi yang dibawa oleh nabi Muhammad yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Jibril sebagai sang penyampai Wahyu yang tidak boleh kita lupakan. Untuk mengarungi kehidupan dan mencapai kebahagiaan maka landasan *fundamental* secara hakikat ini perlu kita cermati perlu kita praktikkan dalam menjalani kehidupan di muka bumi.⁶⁷

Kita Dapat menilai pandangan-pandangan Al-Farabi ini sangat terpengaruh oleh plato dan Aristoteles tidak bisa dipungkiri kemiripan kerangka berpikir yang di cetuskan oleh Al Farabi ini memiliki titik temu berupa kebahagiaan melalui moralitas yang baik dengan menjalankan akhlak atau yang sering kita sebut sebagai etika di dalam diri setiap manusia. Al-Farabi menguraikan begitu panjang bahwasanya sebelum kita mencapai titik yang diharapkan tersebut maka kita perlu terlebih dahulu mengetahui hakikat manusia itu sendiri hakikat Tuhan dan hakikat alam semesta yang pada akhirnya dapat disimpulkan pemikiran etika politik Al-Farabi ini merupakan suatu hal yang memiliki karakter tersendiri yang di mana Al-Farabi tidak melupakan landasan fundamental yaitu Tuhan yang maha esa.⁶⁸

Paradigma tersebut juga memberikan perbedaan yang nampak jelas antara kerangka berpikirnya para filsuf Barat dan Al-Farabi sebagai filsuf dari timur. Al Farabi tidak menafikan adanya metafisika dan tidak melihat segala sesuatu ini berdasarkan realitas dan empirisme tetapi perlu ada kajian yang mendalam yang berdasarkan pedoman

⁶⁶ Krinus Kum, *Filsafat Logika: Pemikiran, Konsep, Teori, dan Penyimpulan*, (Jakarta: Prenada Media, 2023), 119.

⁶⁷ Imam Khanafie Al-Jauharie, *Teema-Tema Pokok Filsafat Islam*, (Pekalongan: NEM, 2020), 94.

⁶⁸ Praja, *Aliran-Aliran Filsafat & Etika*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), 132.

berupa Alquran yang di mana Al Farabi ini menjadikan Alquran ini sebagai landasan untuk mencapai ilmu pengetahuan dan mencapai kebahagiaan.⁶⁹

Pemaparan di atas menggambarkan bahwasanya sebelum kita menjadi pemimpin kita harus memiliki etika politik yang baik. untuk memiliki karakter yang melekat pada setiap diri pemimpin maka perlu ditekankan pemahaman terhadap hakikat manusia dan keberadaannya di atas juga menggambarkan mulai pentingnya ilmu pengetahuan kemudian bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan kemudian bagaimana kita sebagai manusia melihat gejala yang berada di sekitar kita berupa alam semesta dan yang terakhir adalah keutamaan aktualisasi diri kita.

Fungsi utama dalam etika politik terhadap pemerintahan Al-Farabi ini ialah fungsi kepala negara yang serupa dengan fungsi jantung (Al-Qalb) di dalam tubuh manusia. Kepala negara merupakan sumber seluruh aktivitas, sumber peraturan, dan keselarasan hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, ia harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, seperti bertubuh sehat, berani, kuat, cerdas, pencinta pengetahuan serta keadilan, dan memiliki akal mustafad yang dapat berkomunikasi dengan akal kesepuluh, pengatur bumi, dan penyampai wahyu.⁷⁰

Etika politik menurut Al-Farabi dapat juga dimaknai sebagai konsep yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintah.⁷¹ makna etika politik sendiri menurut Al-Farabi mencakup tentang nilai estetik dan nilai etis yang di mana hal tersebut merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa unsur di mana diantaranya adalah cara untuk menjalankan pemerintahan dan mengatur tindak-tanduk keseharian masyarakat. dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya politik juga memiliki peran penting yang menentukan perilaku baik ataupun buruk manusia serta memiliki orientasi terhadap

⁶⁹ Krinus Kum, *Filsafat Logika: Pemikiran, Konsep, Teori, dan Penyimpulan*, (Jakarta: Prenada Media, 2023), 87.

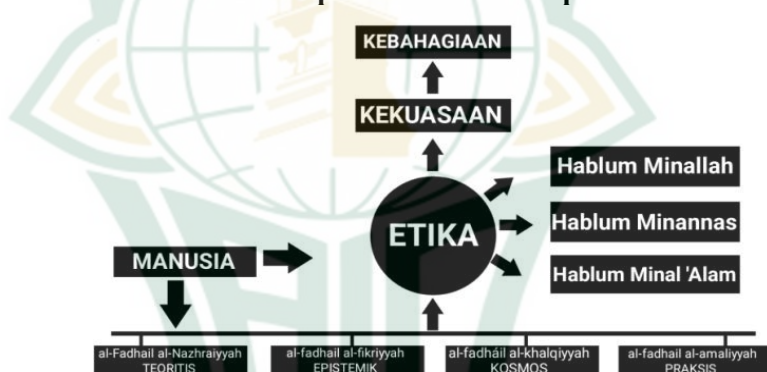
⁷⁰ Muthhar, *The Ideal State*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018),141-144.

⁷¹ Abu Nasr Al-Farabi, *Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah*, (Arab: Muafa' Fham al-Kutub, 1906), 116.

pola hidup masyarakat untuk mencapai kebahagiaan. Al-Farabi menegaskan di dalam karyanya *Al-Madinah Al-Fadhilah* politik bukan semata-mata cara untuk meraih kekuasaan.

Politik juga memiliki andil dalam mewujudkan kesejahteraan secara umum, menurut siti salbiyah dalam skripsi *Etika Politik Perspektif Al-Farabi* Al-Farabi berpendapat bahwasanya antara politik dan etika tidak bisa berdiri dalam satu proposisi melainkan kedua hal tersebut saling bergantung satu sama lain untuk mencapai kebahagiaan hidup apabila salah satu diantara dari kedua unsur tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya maka satu sisi lainnya akan hilang dan tidak memiliki peran mencapai kebahagiaan hidup.⁷² Berikut apabila konsep etika politik Al-Farabi digambarkan:

Gambar 4.1 Konsep Etika Politik Perspektif Al-Farabi



Pemaparan di atas menunjukkan bahwasanya manusia untuk memiliki etika yang baik maka perlu 4 komponen yang pertama adalah *teoritis* yang dimana keilmuan itu sendiri menjadi landasan utama yang digunakan untuk mencapai tahap etika yang baik, kemudian *epistemic* bagaimana cara kita mendapatkan ilmu karena Al-Farabi meyakini ilmu yang baik dan bermanfaat didapatkan dengan cara yang baik pula, Ibnu Katsir ulama yang terkenal dengan tafsir Al-Qur'an menjabarkan bahwasanya ayat pertama yang turun merupakan Rahmat yang pertama terhadap manusia yang ditunjukkan melalui Wahyu yang diturunkan yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5.

⁷² Siti Salbiyah Skripsi: *Etika Politik Perspektif Al-Farabi*, (Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 45-46

أَفْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ٢ أَفَرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ ٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ٥

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan! (1) Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. (2) Bacalah! Tuhanmulah Yang Maha Mulia (3) yang mengajar (manusia) dengan pena. (4) Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. (5)⁷³

Ibnu Katsir dalam karya Daryanto Setiawan et al., “Ilmu Pengetahuan Dalam Al-Qur’an menafsirkan ayat tersebut berisi tentang peringatan dan menunjukkan awal mula penciptaan manusia dari segumpal darah yang di kupas di jurnal ilmu Pengetahuan Dalam Al-Qur’an. Selanjutnya dari sekian banyak kemurahan Allah di antaranya adalah Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya dengan catatan allah memuliakan manusia dengan ilmu dan Ibnu Katsir berpandangan hal tersebut yang menjadikan bapak manusia atau nabi Adam memiliki kelebihan atas malaikat. Ibnu Katsir juga menyimpulkan ilmu terkadang berada di akal pikiran tetapi tidak bisa menjadi acuan terkadang ilmu juga terdapat pada lisan dan tulisan.⁷⁴ selain ilmu pengetahuan ayat ini juga menjabarkan bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan itu sendiri dengan kata iqra' yang memiliki makna bacalah kemudian ditinjau dari asbabun nuzulnya kata bacalah diulang-ulang sebanyak tiga kali oleh malaikat jibril terhadap nabi Muhammad SAW sebelum turun surat Al-Alaq.

Harun Nasution mengklasifikasi di buku Ilmu Kalam: Memahami Theologi Islam Secara Komprehensif, Normatif Dan Historis karya Windu dan Ridwan isi kandungan Al-Quran terdapat beberapa aspek berikut diantaranya keimanan, ibadah, hukum dan akhlak, tasawuf yang di dalamnya memiliki hubungan dengan kejadian alam dan manusia serta hal-hal lain yang berupa pemikiran, ilmu pengetahuan, kehidupan sosial

⁷³ Q.S Al-Alaq 1-5 .

⁷⁴ Daryanto Setiawan et al., “Ilmu Pengetahuan Dalam Al-Qur ’ an” III, no. 2 (2018): 641–656.

kemasyarakatan dan sejarah nabi-nabi dan umat terdahulu.⁷⁵ Konteks kali ini Al-Farabi melihat ayat-ayat *kauniyah* sebagai landasan berpikir tentang kejadian yang memiliki hubungan antara manusia dan alam. ketika kita sudah mencapai pemahaman terhadap manusia dan alam maka hendaknya ketika kita menjalani kehidupan diharapkan bisa menjadi manusia yang tidak melupakan aspek-aspek tersebut. sementara untuk konteks etika politik pandangan Al-Farabi ketika kita menjadi sosok pemimpin maka dalam membuat suatu kebijakan dan menentukan segala tindakan maka kita perlu mempertimbangkan aspek alam semesta.

Ketiga komponen tersebut menurut Al-Farabi akan menghantarkan manusia untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, manusia perlu *Praksis* atau *aktualisasi* untuk mencapai kesadaran etika yang baik kesadaran di mana kesadaran yang diharapkan oleh Al-Farabi memiliki gambaran bagaimana pemahaman-pemahaman di atas dapat dilakukan secara otomatis dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika kita sudah terbiasa dengan nilai-nilai yang telah kita pahami dan dapat menerapkan dengan baik sekalipun kita menjadi pemimpin yang dihadapkan dengan berbagai macam tingkatan itu akan tetap melekat pada karakter pribadi manusia itu sendiri yang kemudian di sana kita dapat mencapai hakikat seorang manusia.⁷⁶

Etika yang baik menurut Abdullah Said akan melahirkan tiga sifat utama manusia yaitu *hablum minallah* hubungan antara manusia dengan sang pencipta kemudian *hablum minannas* hubungan sesama manusia dan yang terakhir adalah *habluminal alam* hubungan manusia dan alam semesta. Apabila manusia tersebut memimpin suatu golongan maka sosok pemimpin ideal harus memperhatikan hal-hal yang telah dijabarkan secara rinci oleh Al-Farabi karena Al-Farabi meyakini ketika sudah mengaktualisasikan dan mempraktekkan

⁷⁵ Redmon Windu Gumati and Inayatilah Ridwan, *Ilmu Kalam: Memahami Theologi Islam Secara Komprehensif, Normatif Dan Historis* (Pangandaran: CV. Intake Pustaka, 2023), 399.

⁷⁶ Ulum, *Al-Farabi: Sang Filsuf Muslim Pendiri Neoplatonisme* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2022), 54

apa yang telah dijabarkan di atas maka manusia akan mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.⁷⁷

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung: tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh, Al-Azab ayat 72⁷⁸

وَالِى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

Artinya: Dan kepada kaum samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya).” Hud ayat 61⁷⁹

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۚ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.”

⁷⁷ Abdullah Said UIN Sunan and Kalijaga Yogyakarta, ‘Filsafat Politik Al-Farabi, 1.1 (2019), 63–78.

⁷⁸ Q.S Al-Azab:72.”

⁷⁹ Q.S Hud:61.

Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” Al-Baqarah ayat 30⁸⁰

Karangan K.H Komarudin sholeh tentang *asbabun nuzul* latar belakang *historis* turunnya ayat-ayat Alquran menurut dan *Asbab Al-Nuzul*: Abi Hasan bin Ahmad Al Wahidi Al-Naisaburi, Arsyad setelah mengkaji lebih dalam di jurnal berjudul Konsep Khalifah Dalam Al- Qur'an (Kajian Ayat 30 Surat Al-Baqarah Dan Ayat 26 Surat Shaad. Ayat-ayat tersebut tergolong pada ayat-ayat tanpa sebab khusus sekalipun ayat-ayat tersebut tidak memiliki *Asbabun Nuzul* tetapi ayat tersebut memiliki fungsi sebagai petunjuk sekaligus peringatan bagi umat manusia khususnya manusia yang menjadi pilihan Allah yang diamati memangku jabatan sebagai khalifah di muka bumi ditambah lagi dari beberapa kitab tafsir yang mencantumkan asbabun Nuzul seperti karya Al Suyuti yang bernama tafsir *Al Mantsur*, karya Jalaludin as suyudi dan Jalaluddin Al mahalli yaitu tafsir *Jalalain* dan yang selanjutnya tafsir Ibnu Katsir.⁸¹

Jurnal ilmiah karya Aslan Dybysbekovich Azerbayev Jamilya Nusupzhanovna Nurmanbetova, yang berjudul “*AlFarabi's Virtuous City As The Prototype of The Civil Society*,” yang diterbitkan oleh *European Journal of Science and Theology* menemukan temuan penting yang di mana Al-farabi dalam kitabnya *Al-Madinah Al-Fadilah* menjabarkan pemimpin yang ideal ya itu nabi ataupun filsuf.⁸² Al-Farabi memiliki pandangan bahwasanya nabi ataupun filsuf adalah orang yang layak untuk menjadi seorang pemimpin dikarenakan mereka sama-sama dapat memahami Wahyu berasal dari Allah tetapi perlu digaris bawahi perbedaan nabi dan filsuf Al-Farabi mengklasifikasikan bahwasanya nabi itu mendapatkan Wahyu

⁸⁰ Q.S Al-Baqarah:30.

⁸¹ Rasyad Universitas Islam Negeri Ar-raniry and Banda Aceh, “Konsep Khalifah Dalam Al- Qur'an (Kajian Ayat 30 Surat Al-Baqarah Dan Ayat 26 Surat Shaad)” 19, no. 1 (2022): 20–31.

⁸² Aslan Dybysbekovich Azerbayev Jamilya Nusupzhanovna Nurmanbetova, “Al-Farabi's Virtuous City As The Prototype of The Civil Society,” *European Journal of Science and Theology* Vol. 12, no. No. 6 (2016), 199.

kebenaran dari Allah sementara filsuf itu mencari kebenaran Allah.

Aslan menyimpulkan yang menjadi perbedaan dari pandangan Al-Farabi tentang nabi dan filsuf bagaimana tentang *epistemologinya*, Aslan juga menemukan bahwa pandangan Al-Farabi ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang telah dijabarkan di atas maka dari itu Al-Farabi dapat memetakan dan mengklasifikasikan untuk menjadi pemimpin yang memiliki etika yang peduli terhadap Tuhan, lingkungan dan sesama manusia berdasarkan ayat-ayat yang menjabarkan tentang khalifah di muka bumi.⁸³ Aslan juga menemukan bahwasanya konsep yang digagas oleh Al-Farabi melalui kitabnya yang berjudul *Al-Madinah Al-Fadilah* mengharuskan untuk pemimpin memiliki etika yang baik dan Aslan juga mengemukakan dalam tulisannya tersebut yang membedakan pandangan Al-Farabi dengan Aristoteles dan Plato adalah bagaimana dasar pemikiran Al-Farabi masih menggunakan Al-Quran yang di mana di agama Islam menjadi pedoman sementara Plato dan Aristoteles hanya berdasarkan rasional.

Kota utama yang merupakan gagasan brilian dari Al-Farabi merupakan hakikat yang memiliki kehidupan dengan penuh kemakmuran dan kebaikan atau dapat kita sebut sebagai kebahagiaan yang di dalam kebahagiaan tersebut mencakup mulai dari peradaban⁸⁴, kesuburan dan kemakmuran baik dari sisi *ekologis* maupun *sosioantropologis*. Adanya gagasan ini Al-Farabi terpengaruh oleh dua faktor yang pertama pandangan para filsuf Barat hal tersebut dapat diperkuat oleh Massignon yang merupakan salah satu pemikir barat yang memiliki keahlian di bidang keilmuan mengkaji peradaban Timur dia mengemukakan Al-Farabi adalah sosok pemikir yang luar biasa.

Keistimewaan Al-Farabi dibanding para pemikir dari timur lainnya adalah beliau sangat kompatibel dalam menafsirkan pikiran-pikiran Yunani khususnya Aristoteles dan Plato. Sekalipun ada pemikir yang mencoba Untuk menafsirkan pemikiran tokoh tersebut seperti misalnya Al-kindi tetapi pemikiran Al-Farabi yang memiliki keistimewaan dan yang

⁸³ Aslan Dybysbekovich Azerbayev Jamilya Nusupzhanovna Nurmanbetova, "Al-Farabi's Virtuous City As The Prototype of The Civil Society," European Journal of Science and Theology Vol. 12, no. No. 6 (2016), 202

⁸⁴ Muthhar, *The Ideal State*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), 141-144.

melahirkan karya-karya fenomenal. Massignon juga nencetuskan bahwasanya Al-Farabi adalah *Al-Mu'allim Al-Tsani* atau guru kedua karena kontribusinya dalam ilmu pengetahuan Islam pada masanya dan generasi setelahnya memiliki pengaruh yang luar biasa.⁸⁵

Faktor lainnya adalah Al-Farabi mengamati keadaan pemerintah pada waktu itu yang kebetulan dikuasai oleh dinasti Abbasiyah di mana pada masa itu dihadapkan dengan guncangan yang berbagai macam gejolak, pertentangan, dan pemberontakan dengan memiliki motif yang beraneka ragam mulai dari agama, kesukuan dan kebendaan. dalam pertikaian tersebut anak-anak raja yang memiliki peran besar di mana mereka memiliki motif kepentingan yang di mana ingin mendapatkan kembali wilayah kekuasaan berdasarkan nenek moyang mereka hal ini sangat didominasi oleh orang-orang Persia dan Turki. dengan maksud kudeta anak-anak raja ini bekerja sama dengan kelompok syiah yang mendirikan gerakan separatis yang di mana keyakinan mereka lebih berhak atas kekuasaan daripada keturunan Abbas. Dari pihak Syi'ah juga gerakan tersebut menjadi tumbuh subur dikarenakan imam ke-12 Syiah yaitu imam Muhammad Mahdi telah meninggal dalam usia 4 atau 5 tahun.⁸⁶ Peristiwa itu sangat mempengaruhi corak berpikir Al-Farabi tentang bagaimana seorang pemimpin untuk menjalankan pemerintahan dan dari kekacauan politik tersebut juga maka lahirlah ide gagasan Al-Farabi tentang *Al-fadilah Al-Madinah* yang di mana kita semua mengetahui itu merupakan karya Al-Farabi mengenai tentang bagaimana kekuasaan dijalankan dengan etika yang harus dijunjung tinggi untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

C. Analisis Data Penelitian

1. Tujuan PAN dan Etika Politik Al-Farabi

Data yang telah didapatkan dalam penelitian kali ini akan kita analisis lebih dalam pada pembahasan Sub bab ini, yang di mana ditujukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Khususnya pada sejauh mana implementasi yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional tentang prinsip-prinsip etika

⁸⁵ Ris'an Rusli, *Filsafat Islam: Telaah Tokoh dan Pemikirannya*, (Jakarta: Prenada Media, 2021), 57.

⁸⁶ Siti Salbiyah Skripsi: *Etika Politik Perspektif Al-Farabi*, (Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 45-46

politik Al-Farabi. Penjabaran deskripsi data penelitian sudah menunjukkan bahwasanya terdapat persamaan prinsip dan konsep etika politik Partai Amanat Nasional dengan konsep etika politik Al-Farabi melalui Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Tujuan Partai Amanat Nasional yaitu mewujudkan Indonesia baru yang menjunjung tinggi dan menegakkan nilai-nilai iman dan taqwa kedaulatan rakyat keadilan sosial kemakmuran dan kesejahteraan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.⁸⁷ Sementara pandangan etika politik Al-Farabi *mendiskursuskan* bahwasanya melalui etika kita dapat mencapai kebahagiaan. jika dilihat tujuan partai amanat nasional merupakan uraian yang lebih spesifik tentang kebahagiaan yang dimaksud dari Al-Farabi sementara di sisi lain hal tersebut selaras dengan konsep kenegaraan yang diusung oleh Al-Farabi yaitu alamah atau kesatuan dari suatu bangsa yang memiliki bagian dari bangsa yang besar atau global.⁸⁸

Mabadi Ardi Ahli Madinatu al-Fadhilah secara bahasa etimologi berarti Dasar-dasar Fikiran dari Warga Negara Utama Karya Al-Farabi yang menjabarkan tentang cita-cita kenegaraan untuk mencapai kebahagiaan secara bersama-sama. Menurut Al Farabi dalam mencapai kebahagiaan ditatanan sosial.⁸⁹ Dipahami bagaimana pentingnya *asosiasi* atau kerjasama antar manusia dalam mencapai kebahagiaan dan menyelesaikan urusan-urusan penting. Baginya, manusia tidak dapat mencapai potensi terbaiknya kecuali melalui kolaborasi dan kerjasama dengan sesama manusia. Konsep ini menekankan pentingnya komunitas dan interaksi sosial dalam pembentukan kebahagiaan dan kesuksesan individu.⁹⁰

Tujuan Partai Amanat Nasional sebagian besar meliputi hajat keinginan orang banyak yang di mana secara ilmu etika *normatif* disebut *utilitarianisme*. Abraham maslow mendefinisikan di dalam teorinya yang terkenal yaitu

⁸⁷ Rizqo Dzulqornain and others, 'Pengajuan Pengujian AD / ART Partai Politik di Mahkamah Agung', (Jakarta: February, 2022), 11.

⁸⁸ Muthhar, *The Ideal State*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), 172.

⁸⁹ Abu Nasr Al-Farabi, *Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah*, (Arab: Muafa' Fham al-Kutub, 1906), 79.

⁹⁰ Muhamad Fajar Pramono and Riza Maulidia, "Konsep Negara Utama dan Hubungannya Dengan Kebahagiaan Menurut Al-Farabi" 8, no. 4 (2022): 1276–92.

“Kebutuhan Dasar Manusia” bahwasanya pijakan manusia itu adalah kebutuhan fisiologi, rasa aman, kasih sayang penghargaan, aktualisasi diri. Apabila kebutuhan dasar manusia itu telah dicukupi maka hal tersebut dapat dijadikan parameter untuk mencapai kebahagiaan karena kegelisahan dalam menjadi makhluk hidup sudah tidak begitu dikawatirkan. Sehingga ketenangan dan kebahagiaan akan mengiringi perjalanan kehidupan kita sebagai manusia.⁹¹

Landasan manusia sebagai makhluk sosial yang di mana menjadi batu pijakan Al-Farabi melihat etika politik yang tujuan akhirnya memiliki hubungan bagaimana menciptakan suatu kebahagiaan melalui negara atau pemimpin suatu wilayah terhadap rakyat. Maka dengan lebih mengutamakan kepentingan rakyat terlebih dahulu daripada diri seorang pemimpin. Konteks yang dapat kita lihat secara seksama Partai Amanat Nasional sebagai lembaga politik yang dapat *mengagregasi* kepentingan masyarakat menjadikan etika politik yang digunakan harus memiliki nilai kebaikan untuk semua. Sehingga rakyat yang merupakan *asosiasi* dari individu dapat mencapai kebahagiaan dalam tujuan PAN juga nampak jelas kemakmuran dan kesejahteraan menjadi landasan utama peran mereka sebagai lembaga yang diakui negara untuk ikut andil dalam merealisasikan tujuan Negara Indonesia.⁹²

Ketua dewan pimpinan wilayah (DPW) PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo sekaligus menduduki kursi legislatif sebagai anggota DPR RI komisi VI. Menekankan pemerintah untuk mempercepat transfer *transformasi* ekonomi di Indonesia dia juga mendorong pemerintah agar komitmen terhadap target pendapatan pemerintah tahun 2024 tumbuh 11,81% hingga 12,38% dari PDB maka di sini Eko yang merepresentasikan lembaga PAN akan terus berkomitmen mengawal komitmen pemerintah terhadap tujuan yang telah ditentukan. Secara spesifik dia juga menyorot tentang menghapuskan kemiskinan ekstrem, transformasi ekonomi, pengendalian inflasi, penurunan *stunting*, memperkuat investasi, memperkuat Sumber Daya

⁹¹ S Calicchio, Abraham Maslow, *Dari Hierarki Kebutuhan Hingga Pemenuhan Diri: Sebuah Perjalanan Dalam Psikologi Humanistik Melalui Hierarki Kebutuhan, Motivasi, dan Pencapaian Potensi Manusia Sepenuhnya* (Stefano Calicchio, 2023).

⁹² Abdullah Said, “Filsafat Politik Al-Farabi,” Jurnal IJITP Vol. 1, no. 1 (2019): 66.

Manusia (SDM), percepatan pembangunan infrastruktur dan memperkuat hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) dengan *deregulasi* dan penguatan institusi.⁹³

Pemaparan di atas menunjukkan bahwasanya antara konsep etika politik yang dibawa oleh Al-Farabi dan tujuan Partai Amanat Nasional memiliki *korelasi* dengan apa yang direpresentasikan melalui kader-kader partai amanat nasional. Dari contoh berita yang memuat tentang sikap partai amanat nasional terhadap pemerintah di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial menunjukkan bahwasanya komitmen partai ini melalui kadernya sampai sejauh ini masih relevan. dalam 12 konsep etika Al-Farabi menjabarkan ketika kita menjadi seorang pemimpin kita tidak boleh melupakan kepentingan rakyat dan mementingkan diri sendiri. Dari sini juga terlihat bahwasanya penyampaian yang dibawakan oleh Eko Hendro Purnomo selaku kader Partai Amanat Nasional sekaligus anggota DPR RI dapat dipahami dengan baik hal tersebut juga dicantumkan dalam prinsip-prinsip yang dibawakan oleh Al-Farabi. Yang selanjutnya seorang pemimpin harus mencintai keadilan dan memerangi keburukan di sini argumentasi yang dibangun dan kepentingan yang disampaikan Partai Amanat Nasional itu berpihak kepada masyarakat yang memiliki keadaan ekonomi buruk.⁹⁴

2. Asas PAN dan Etika Politik Al-Farabi.

Akhlaq politik berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam menjadi asas partai amanat nasional yang di mana sumber-sumber etika yang digunakan oleh partai ini berdasarkan nilai-nilai agama yang memiliki kebermanfaatan bagi alam semesta dan penghuninya.⁹⁵ dalam pemikiran Al-Farabi yang dibahas Muhammad Syafi'i, E Prinsip Etika Politik Pemimpin Dalam Islam dikupas tentang

⁹³ Panji Baskhara, "Ini Tujuan Partai Amanat Nasional Dorong Pemerintah untuk Lakukan Percepatan Transformasi Ekonomi." <https://wartakota.tribunnews.com/2023/08/17/ini-tujuan-partai-amanat-nasional-dorong-pemerintah-untuk-lakukan-percepatan-transformasi-ekonomi?page=4>, diakses pada tanggal 14 mei 2024, pukul 22.43 WIB.

⁹⁴ Farhah, Achmad Farid, *Prinsip Etika Politik Pemimpin Dalam Islam*, Dauryah Journal of Islamic and Internasional Affairs, Vol. 4 No. 2 (2019), 66-84.

⁹⁵ Rizqo Dzulqornain and others, 'Pengajuan Pengujian AD / ART Partai Politik di Mahkamah Agung', (Jakarta: February, 2022), 11.

etika politiknya juga berdasarkan ayat-ayat yang bersumber dari Al-Qur'an yang mana Al-Farabi juga bukan terpacu pada manusia tetapi meliputi tiga unsur yaitu *hablum minallah*, *hablum minannas* dan *habluminal alam*. Tetapi sebelum mencapai etika politik bagi alam semesta Al-Farabi menekankan bagaimana cara *epistemologi* untuk mendapatkan pengetahuan sehingga menghantarkan manusia ini yang memiliki akal aktif dan akal pasif dapat mencapai karakter pemimpin yang ideal.⁹⁶

Pandangan Nurcholish Madjid tentang etika politik di dalam thesis Eka Zuliana menekankan bahwa kehidupan politik harus tetap berakar pada nilai-nilai keagamaan dan moral yang tinggi. Berpolitik dengan standar akhlak mulia adalah penting, dengan fokus pada prinsip-prinsip moral kemanusiaan dan keadilan. Hal ini menjadi landasan penting bagi keberlanjutan suatu bangsa dalam menghadapi perubahan kompleks dalam kehidupan.⁹⁷

Perlu digarisbawahi tentang penjabaran dari Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional yang memuat asas di situ tidak ada kontak secara eksplisit yang menyebutkan Islam sebagai acuan. tetapi Al-Farabi mendasarkan etika politiknya berdasarkan nilai yang bersumber dari Al-Quran sekalipun dalam hasilnya dipengaruhi oleh pemikiran Plato dan Aristoteles.⁹⁸ Hal tersebut tidak menjadi masalah karena secara *sosioantropologi* partai amanat nasional ini berada di negara Indonesia yang kita tahu memiliki banyak keyakinan sementara Al-Farabi memang berdasarkan pikirannya tersebut secara subjektif dan Partai Amanat Nasional ini secara sifat juga menegaskan tentang keterbukaan yang berarti dapat diakses oleh siapapun tanpa membedakan agama. Secara Agregasi apabila partai amanat nasional ini masih mengunci diri terhadap satu golongan maka akan sulit untuk menarik simpati masyarakat umum yang di mana hal tersebut akan

⁹⁶ Muhammad Syafi'i, *E Prinsip Etika Politik Pemimpin Dalam Islam*, Ilmu Ushuluddin, Vol. 16, No. 2 Desember 2017, 139-160.

⁹⁷ Eka Zuliana, Tesis, *Konsep Etika Politik Menurut Pemikiran Nurcholish Madjid*, (Medan: Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2015), 128.

⁹⁸ Ulum, *Al-Farabi: Sang Filsuf Muslim Pendiri Neoplatonisme* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2022), 26.

mempengaruhi perolehan kursi di lembaga legislatif maupun eksekutif.⁹⁹

Pandangan Emile Durkheim dalam karya Eka Zuliana, Tesis, *Konsep Etika Politik Menurut Pemikiran Nurcholish Madjid* tentang agama menekankan bahwa agama adalah suatu sistem yang melibatkan kepercayaan dan praktik yang terkait dengan hal-hal yang dianggap suci, yang pada gilirannya menyatukan para pengikutnya dalam suatu komunitas moral atau umat. Agama tidak hanya sebagai urusan individual, tetapi juga memainkan peran penting dalam membangun dan memelihara kohesi sosial dalam masyarakat khususnya etika dan moralitas.¹⁰⁰ Berikut ulasan berdasarkan pandangan beberapa agama dalam melihat etika politik:

a. Yahudi

Ajaran Yahudi, konsep tanggung jawab pribadi terhadap diri sendiri *the self* adalah fondasi dari etika. Ini berarti bahwa individu bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya sendiri. Namun, sebagai anggota masyarakat atau negara, kita juga memikul tanggung jawab sebagai warga atau imigran yang diakui secara legal. Ini mencakup hak dan kewajiban sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih besar.¹⁰¹

b. Buddha

Ajaran agama Buddha, prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat sangat penting dalam konteks etika politik dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep ini menekankan pentingnya diskusi dan kesepakatan bersama dalam mencapai kebahagiaan suatu bangsa. Dengan berdialog dan mencapai kesepakatan bersama, diharapkan masyarakat dapat menciptakan kondisi yang mendukung kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bersama.¹⁰²

c. Hindu

Etika politik Agama Hindu, konsep kepatuhan terhadap hukum dan pemerintah sangat ditekankan.

⁹⁹Eka Zuliana, Tesis, *Konsep Etika Politik Menurut Pemikiran Nurcholish Madjid*, (Medan: Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2015), 16.

¹⁰⁰Bahaf, *Ilmu Perbandingan Agama* (Serang: A-Empat, 2015),34.

¹⁰¹Magnis-Suseno, *Etika Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 131.

¹⁰² Intan, *“Agama Publik” di Bumi Pancasila: Analisis Etika dan Sosiologis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022), 296.

Nitisastra mengajarkan pentingnya warga negara untuk patuh pada aturan hukum dan mendukung kebijaksanaan pemerintah. Ini berarti bahwa warga diminta untuk terlibat aktif dalam pembinaan negara dan memainkan peran mereka dalam memajukan masyarakat menuju kebaikan bersama.¹⁰³

d. Nasrani

Pandangan Nasraani melihat korelasi antara politik dan agama memiliki pemisahan antara gereja dan negara merupakan prinsip penting dalam agama Nasrani. Ini memastikan bahwa urusan agama tidak ikut campur dalam urusan politik dan sebaliknya. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan agama dalam kebijakan politik dan menjaga kebebasan beragama bagi semua warga negara.¹⁰⁴

e. Islam

Etika politik Islam jika menggunakan Nabi Muhammad Saw sebagai acuan, maka segala tindakan akan menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk sistem sosial-politik yang terbuka dan inklusif. Konsep partisipasi politik berakar pada hak individu dan kebaikan kolektif. Budaya musyawarah menjadi penting dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan keterlibatan seluruh anggota masyarakat. Etika politik bagi umat Islam didasarkan pada ajaran agama dan prinsip-prinsip tentang hak dan kewajiban yang diperlukan untuk menjaga kesejahteraan bersama dalam masyarakat.¹⁰⁵

Signifikansi antara etika yang dihasilkan oleh agama memberikan dampak besar bagi perpolitikan di Indonesia. Pandangan-pandangan yang menyoroti pentingnya nilai-nilai agama dalam konteks politik diungkapkan oleh Nurcholish Madjid di buku yang berjudul Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran. Salah satu intelektual muslim yang memiliki pandangan *integralistik* secara etika bernegara, namun disisilain menerapkan *sekuleristik* politik praktis antara agama dan

¹⁰³ Muchtarom, *Dinamika Etika Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka2023),135.

¹⁰⁴ Magnis-Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 134.

¹⁰⁵ Hamzani, Aravik, and Khasanah, *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran*,(Pekalongan: PT Nasya Expanding Management 2021), 78.

kepentingan partai politik. Nurcholish Madjid memandang agama dan negara sambil menggaris bawahi prinsip-prinsip moral kemanusiaan dan keadilan. Dengan demikian, ia membantu memperkuat semangat Pancasila sebagai landasan moral dan etika politik bagi bangsa Indonesia.¹⁰⁶

Melalui konsep tersebut, Nurcholish Madjid menekankan bahwa Pancasila tidak hanya merupakan sebuah doktrin politik, tetapi juga mencerminkan kesatuan dalam keberagaman agama di Indonesia. Dengan mengembalikan eksistensi Pancasila sebagai identitas etika politik bangsa, ia memperkuat nilai-nilai inklusif dan kebebasan yang menjadi pondasi bagi masyarakat Indonesia. Secara keseluruhan, pemikiran etika politik Nurcholish Madjid membawa kontribusi yang berharga dalam memperkuat semangat demokrasi, *pluralisme*, dan keadilan dalam perpolitikan Indonesia.

Bara Hasibuan, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) bidang Hubungan Luar Negeri, menegaskan bahwa PAN bukanlah partai Islam, melainkan partai yang terbuka untuk siapapun tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau ras. PAN memperjuangkan citra sebagai partai inklusif dan terbuka, sebagai langkah untuk menjadi rumah bagi semua golongan.¹⁰⁷

Secara historis partai ini juga pernah mengalami pertentangan di dalam internal yang pada waktu itu terjadi pada kongres pertama. Terlihat ada perbedaan pandangan di internal PAN, yang mencakup beberapa wilayah dan jajaran pengurus DPP PAN, termasuk Sekretaris Jenderal saat itu, Faisal Basri, dan Wakil Sekretaris Jenderal, Santoso. Ini menunjukkan adanya dinamika internal dalam upaya memperjelas identitas dan arah partai, termasuk isu-isu seperti narasi agama dan inklusivitas. Jadi setelah mengalami dinamika yang panjang partai ini memutuskan bahwasanya keterbukaan dijadikan asas yang disepakati sampai detik ini.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Muslim, *Nurcholis Madjid dan Politik Muslim* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 41.

¹⁰⁷ Robertus Wardi, "Bara Hasibuan: PAN Bukan Partai Islam." <https://www.beritasatu.com/news/152160/bara-hasibuan-pan-bukan-partai-islam>, diakses pada tanggal 14 mei 2024, pukul 23.33 WIB.

¹⁰⁸ Hendra Kusuma, "Dinamika Partai Amanat Nasional di Bali Tahun 1999-2019." 1, no. 1 (2023).

3. Etika Politik PAN dan Etika Politik Al-Farabi

Nilai-nilai moral yang dilandasi oleh asas sifat identitas dan fungsi partai digunakan sebagai acuan pola pikir sikap dan tingkah laku kader, anggota dan simpatisan partai amanat nasional hal tersebut diatur pada pasal 11 Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional yang membahas tentang etika politik.¹⁰⁹ Etika politik menurut Al Farabi memiliki 12 prinsip yang di mana sebagian besar prinsip tersebut dapat terepresentasikan melalui apa yang tertuang di dalam anggaran dasar Partai Amanat Nasional. Tidak berhenti sampai di situ representasi dari sikap partai yang dibawa oleh kadernya menunjukkan hal yang selaras dengan apa yang telah tertuang dalam anggaran dasar Partai Amanat Nasional.

PAN mendapat pengakuan sebagai role model etika berdemokrasi dalam pemilu 2024, menunjukkan pentingnya integritas dan transparansi dalam proses demokratis. Menurut sekjen komite independen pemantau pemilu Indonesia Kaka Suminta mengapresiasi sifat negarawan Zulkifli Hasan yang dapat menempatkan diri sebagai politisi dan menteri. sebelumnya berita simpang siur terhadap ketua umum partai menata nasional menjadi trending di Indonesia, akibat hadirnya Zulkifli Hasan kepada masyarakat yang diketahui sedang berkampanye. Kemudian dikonfirmasi oleh derajat Wibowo selaku dewan pakar Partai Amanat Nasional bahwasanya gedung mereka hadir itu sebagai representasi dari partai amanat nasional.¹¹⁰

Sikap Partai Amanat Nasional tidak datang dengan sendirinya perlu ditopang dengan kaderisasi yang ditanamkan terhadap anggotanya sehingga mempengaruhi segala bentuk tindakan dan menjadikan karakter yang di mana secara umum kita dapat menilai Partai Amanat Nasional ini dari etika politik yang dibawa oleh para kadernya. Melalui sistematisasi proses kaderisasi partai merupakan komponen penting dalam sistem kaderisasi partai politik. Ini memungkinkan partai untuk mengembangkan ideologi dan meningkatkan kapasitas kader

¹⁰⁹ Rizqo Dzulqornain and others, 'Pengajuan Pengujian AD / ART Partai Politik di Mahkamah Agung', (Jakarta: February, 2022), 13.

¹¹⁰ Candra Hendrik, "Soal Etika Politik PAN Dapat Menjadi Model Etika Berdemokrasi" <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/54782-soal-etika-politik-pan-dapat-menjadi-model-etika-berdemokrasi?page=all>. 20 Juli 2022, 01.02 WIB

politik mereka melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan membangun pemahaman yang kuat tentang ideologi partai, kader dapat menjadi lebih efektif dalam melaksanakan tugas mereka sebagai perwakilan dalam proses legislatif dan dalam membangun kerja partai secara keseluruhan. Inovasi yang demokratis dalam kegiatan seperti ini dapat membantu memperkuat partai politik dan meningkatkan kapasitas pengkaderan mereka untuk masa depan.¹¹¹

Kaderisasi Partai Amanat Nasional diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga BAB II pasal 3 yang di dalamnya menjabarkan Partai Amanat Nasional memiliki keterbukaan bagi seluruh warga negara Indonesia selama memiliki komitmen yang sama dengan tujuan dan tunduk dan patuh terhadap AD/ART Partai Amanat Nasional. Dalam pasal 4 di bab yang sama dijabarkan syarat untuk menjadi anggota Partai Amanat Nasional terdapat tiga yaitu:

- a. Berumur 17 tahun
- b. Memiliki agama sesuai dengan keyakinannya
- c. Tidak menjadi anggota ataupun pengurus Partai lain.

Proses kaderisasi memiliki jenjang Latihan Kader Amanat Dasar kemudian Latihan Kader Amanat Madya Dan yang terakhir Latihan Kader Amanat Utama. Sementara untuk yang melaksanakan latihan kader dalam proses kaderisasi di Partai Amanat Nasional yang mana didasarkan pada pembagian struktur jabatan di tingkatan wilayah hal itu diatur dalam pasal 5 Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional.¹¹²

Kaderisasi partai politik tidak selalu menjadikan karakter anggota partai politik memiliki etika yang baik di sisi lain terdapat anggota partai politik yang tidak dapat mengaktualisasikan hasil dari proses kaderisasi yang ada di dalam partai politik. Begitupun proses kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional tak seutuhnya menghasilkan Kader yang berkualitas Contohnya adalah korupsi banyak kader partai politik yang terjerat kasus korupsi. politik berikut data yang saya dapatkan dari kompas.com dalam rentan tahun 2011-2023:

¹¹¹ Muhammad Irfan and Dhiaulhaq, “Studi Kaderisasi Terhadap Partai Amanat Nasional (PAN): Problematika Calon Legislatif Artis” 3, no. 1 (2014): 162–73.

¹¹² Rizqo Dzulkornain and others, ‘Pengajuan Pengujian AD / ART Partai Politik di Mahkamah Agung’, (Jakarta: February, 2022), 25.

Data-data yang telah saya reduksi dan saya display menghasilkan jawaban atas rumusan masalah penelitian yang saya angkat pada skripsi kali ini. secara garis besar etika politik Al-Farabi terdiri dari 12 prinsip.¹¹³ Dimana hal tersebut didasarkan kepada pemahaman teoritis cara mendapatkan ilmu alam semesta dan praksis sehingga akan melahirkan etika yang memiliki korelasi terhadap *hablum minallah hablum minannas dan hablumina alam* hingga mengantarkan kita kepada kebahagiaan apabila kita menjadi seorang pemimpin.¹¹⁴

Nilai-nilai etika politik yang dibawa oleh partai amanat nasional baik melalui anggaran dasar yang kemudian diterapkan pada anggota melalui kaderisasi. Sebagian besar memiliki kesamaan nilai-nilai terhadap pemikiran etika politik Al-Farabi sekalipun dalam konteks tertentu memiliki perbedaan dikarenakan Partai Amanat Nasional adalah sebuah kelembagaan yang tidak memiliki otoritas penduduk layaknya negara, tetapi dalam konteks-konteks tertentu. Khususnya dalam etika politik banyak sekali kesamaan dan keselarasan yang dimiliki antara keduanya.

¹¹³ Farhah, Achmad Farid, *Prinsip Etika Politik Pemimpin Dalam Islam* Dauryah Journal of Islamic and Internasional Affairs, Vol. 4 No. 2 (2019), 66-84.

¹¹⁴ Krinus Kum, *Filsafat Logika: Pemikiran, Konsep, Teori dan Penyimpulan* (Jakarta: Prenada Media, 2023), 119.